



# Diplomasi

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PERTANIAN



Menteri Pertanian RI Bersama Menteri Pertanian Anggota G20 (12/09/2020)

4

Fasilitasi Akses Pasar  
Indonesia - Kolombia Sepakati Perluasan Akses Pasar Kedua Negara

12

Kerja Sama Teknis & Investasi  
Ketahanan Pangan Regional ASEAN di Tengah Pandemi Covid-19

30

Kegiatan Biro KLN  
Bimtek Aplikasi SIPOR PHLN 3.0 dan Website e-PDLN

# Diplomasi

Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri terus melakukan *adjustment* dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini melalui rangkaian kegiatan yang diupayakan untuk mendorong akselerasi ekspor komoditas pertanian ke pasar global. Catatan upaya fasilitasi akses pasar serta mobilisasi bantuan teknis dan investasi yang dilakukan selama periode bulan Juli-Desember 2020 dirangkum dalam buletin Diplomasi edisi ke-7 tahun 2020 dengan gambaran umum sebagai berikut.

Menteri Pertanian RI menerima *courtesy call* baik secara fisik ataupun virtual dengan Menteri Pertanian dan Duta Besar negara mitra serta Kepala Perwakilan Organisasi Internasional, yang menghasilkan komitmen diantaranya Menteri Pertanian Australia sepakat untuk menyusun *Memorandum of Understanding* yang akan dijadikan dasar untuk pengembangan pertanian Indonesia dan Australia. Kolombia berkomitmen untuk membuka perluasan pasar komoditas pertanian Indonesia di Kolombia serta kerja sama peningkatan produktivitas produk pertanian kedua belah pihak. Penguatan akses pasar ke Selandia Baru dilakukan melalui kerja sama teknis dan investasi khususnya untuk komoditas-komoditas pertanian Indonesia berorientasi ekspor. Penguatan kerja sama teknis dan investasi bidang pertanian juga dilakukan dengan Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Denmark, dan Inggris.

Selain melalui kerangka *government to government*, Indonesia juga menindaklanjuti rencana pengembangan gandum, jagung, dan stevia dengan investor swasta Rusia, Artis International Pte, Ltd. Komitmen penguatan kerja sama dengan Koordinator Badan-Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Indonesia dan *International Rice Research Institute* (IRRI) yang akan bergabung ke dalam manajemen *One-CGIAR* juga telah disetujui oleh masing-masing pihak.

Di samping berbagai kegiatan tersebut, advokasi kebijakan dan program, serta kajian terkait isu-isu penguatan kerja sama luar negeri bidang pertanian juga telah diselenggarakan.

Pada forum-forum internasional, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 tetap menjadi agenda utama dan menjadi komitmen bersama di level regional dan global.

Seluruh kegiatan yang terus diupayakan dalam situasi pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya mewujudkan Pertanian Nasional yang Maju, Mandiri, dan Modern.



**Dr. Ade Candradijaya**

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri  
Kementerian Pertanian

## Redaksi

Tim Pengelola Informasi, Dokumentasi dan  
Buletin (PIDB)

Biro Kerja Sama Luar Negeri,  
Sekretariat Jenderal - Kementan RI

Saran dan kritik dapat disampaikan melalui  
email [publikasi.kln@gmail.com](mailto:publikasi.kln@gmail.com)

Media Sosial Biro KLN

 KLN Pertanian

## Fasilitasi Akses Pasar

- Indonesia - Australia Sepakat Tindaklanjuti Penyelesaian MoU Bidang Pertanian 2 - 3
- Indonesia - Kolombia Sepakati Perluasan Akses Pasar Kedua Negara 4
- Indonesia Dorong Investasi Swiss Untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian Nasional 5
- Brief Update Penguatan Akses Pasar dengan Negara Mitra 6 - 7

## Kerja Sama Teknis dan Investasi

- Mentan RI Paparkan Kebijakan dan Capaian Sektor Pertanian di G-20 8
- APEC Deklarasikan Pernyataan Bersama Perkuat Rantai Pasok Pangan dan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19 9
- Penguatan Tata Kelola Global untuk Ketahanan Pangan dan Gizi di Forum FAO 10 - 11
- Ketahanan Pangan Regional ASEAN di Tengah Pandemi Covid-19 12 - 13
- Penguatan Kerja Sama dengan Koordinator Badan-Badan PBB di Indonesia (*United Nations Resident Coordinator*) 14
- Indonesia Dukung Penggabungan IRRI menjadi *One-CGIAR*, Fokus Implementasi *Workplan 2020-2024* 15
- Kementan Dorong Investasi *World Bank* untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi 16
- Investor Swasta Rusia, *Artis International Pte, Ltd.*, Tindaklanjuti Rencana Pengembangan Gandum, Jagung dan Stevia 17
- Penguatan Kerja Sama Teknis Komoditas Berorientasi Ekspor dengan Selandia Baru 18
- Kementan Dukung Program UNDP untuk Peningkatan Ketahanan Iklim Petani NTT 19
- *Brief Update* Penguatan Kerja Sama Teknis dan Investasi 20 - 21

## Brief Highlights

22 - 25

## Kajian

26 - 27

## Kegiatan Biro KLN

28 - 31

## Agenda

32

## Indonesia - Australia Sepakat Tindaklanjuti Penyelesaian MoU Bidang Pertanian

Tahun 2019 lalu menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, sebagai salah satu mitra strategis bagi Indonesia.



Dalam bidang pertanian, Indonesia dan Australia aktif melakukan kerja sama teknis melalui kerangka pertemuan tahunan *Working Group on Agriculture, Food, and Forestry Cooperation* (WGAFFC) yang telah dilaksanakan sebanyak 22 kali sejak pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF) pada tahun 1992, dengan area prioritas *Livestock and Animal Product; Crops and Plant Product; dan Forestry*.

Kerja sama kedua negara semakin kuat dan komprehensif setelah ditandatanganinya perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) yang mencakup 5 pilar pada 4 Maret 2019. IA-CEPA merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, penanaman modal, sumber daya manusia, di tengah pelemahan ekonomi dunia dan semakin banyaknya hambatan perdagangan di setiap negara. Kinerja perdagangan Indonesia - Australia tercatat mencapai USD17,8 miliar atau sekitar Rp240,3 triliun di tahun 2019.

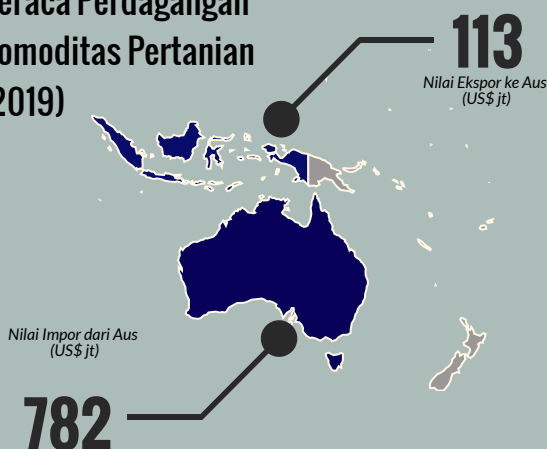
Dalam rangka penguatan kerja sama sektor pertanian, Menteri Pertanian RI menerima virtual *courtesy call* Menteri Pertanian Australia, David Littleproud, MP, pada tanggal 28 September 2020. Selain memperkenalkan diri sebagai Menteri Pertanian Australia yang baru, pertemuan juga dimaksudkan untuk membahas kemajuan kerja sama pertanian antar kedua negara.

Mentan RI menyampaikan peran strategis sektor pertanian di Indonesia dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi lebih dari 273 juta rakyat Indonesia. Untuk memajukan sektor pertanian nasional dalam kerangka kehidupan berbangsa, Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra, khususnya dengan negara tetangga, termasuk Australia.

Mentan Australia menyambut baik dan meyakini bahwa Australia juga membutuhkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan sektor pertanian Australia. Untuk itu, Mentan Littleproud menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan bagi pengembangan sektor pertanian Indonesia tidak hanya berupa komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun juga pengetahuan teknis pertanian yang dapat diberikan oleh tenaga ahli Australia kepada Indonesia. Mentan Australia juga berkomitmen dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan yang dapat menguntungkan kedua negara.

Mentan RI menyampaikan gagasannya agar Indonesia dan Australia dapat segera menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang pertanian. MoU tersebut diharapkan dapat menjadi payung kerja sama untuk merintis berbagai inisiatif baru yang konkret dan dapat berkontribusi positif pada pengembangan pertanian kedua negara. Merespon hal ini, Mentan Australia berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan MoU agar dapat ditandatangani oleh kedua Mentan.

### Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian (2019)





## Kinerja Perdagangan RI - AUS

Komoditas perkebunan mendominasi nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Australia. Pada tahun 2019, nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai USD 97,2 juta, dengan kakao sebagai kontributor utama ekspor Indonesia ke Australia (10 ribu ton dengan nilai ekspor USD 43,6 juta), kelapa sawit (USD 17,7 juta), kopi (USD 10,2 juta), teh (8,8 juta), dan karet (USD 5,3 juta).

Sementara itu, ekspor komoditas hortikultura masih sebesar USD 10,5 juta yang didominasi oleh nanas. Ekspor nanas dalam bentuk nanas kaleng mencapai USD 7,4 juta. Untuk itu, Indonesia mendorong percepatan pembukaan akses pasar buah-buahan tropis Indonesia, seperti nanas, manggis, salak, dan buah naga, ke Australia. Selain hortikultura, Kementan juga sedang melakukan pengajuan akses pasar bagi komoditas sarang burung walet dan produk olahan daging ayam ke Australia.

Di sisi lain, Australia merupakan pemasok impor daging sapi terbesar bagi Indonesia. Impor daging sapi dari Negeri Kanguru tercatat sekitar 85 ribu ton atau 53% dari total impor seberat 160.197 ton. Nilai impor daging sapi dari Australia mencapai USD 296,3 juta setara Rp4 triliun dari total nilai impor Rp7,7 triliun. Selain daging sapi, Indonesia juga mengimpor gandum/meslin (USD 296 juta), gula tebu (USD 189 juta), anggur (USD 99 juta), kapas (USD 75 juta), jeruk (USD 26 juta) dari Australia.

Oleh karena itu, percepatan pembukaan akses pasar, khususnya untuk komoditas hortikultura Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan ekspor komoditas pertanian Indonesia serta mengurangi defisit neraca perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Australia yang pada tahun 2019 mencapai USD 669 juta.

“Leaders reaffirmed the benefits of open markets and inclusive regional economic integration. Leaders committed to working constructively together through the G20, APEC and other regional and multilateral fora to support the multilateral trading system and take forward WTO reform. Leaders reaffirmed their commitment to the RCEP, and will work together to finalise all outstanding negotiations ahead of signature in 2020, completing an agreement which builds on the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) and which complements IA-CEPA.”

Joint Commitment  
Indonesia - Australia (10/2/20)



TOP TRADE



**38%**  
Kakao

**37%**  
Gandum

**15%**  
Kelapa Sawit

**24%**  
Gula Tebu

**9%**  
Kopi

**12%**  
Anggur

*"A friend in need is a friend indeed. Australia selalu berada di samping Indonesia saat Indonesia terkena musibah"*

Presiden Joko Widodo  
(Canberra, 10/02/20)





Courtesy call Mentan RI dan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia, H.E. Juan C.V. Gonzalez (20/11/20)

## Indonesia - Kolombia Sepakati Perluasan Akses Pasar Kedua Negara

Kolombia berkomitmen membuka akses pasar yang seluas-luasnya untuk produk obat hewan (vaksin) asal Indonesia ke pasar Kolombia. Hal ini disampaikan oleh Duta Besar Kolombia untuk Indonesia Y.M. Juan Camilo Valencia Gonzalez dalam kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertanian RI pada 20 November 2020 di Jakarta.

Meskipun saat ini pasar obat hewan di Kolombia masih dikuasai oleh Amerika Serikat, Dubes Juan Camilo optimis produk Indonesia akan mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Selain obat hewan, Mentan RI juga mendorong peningkatan fasilitasi akses pasar bagi komoditas perkebunan seperti karet, kelapa sawit, minyak atsiri, rempah dan buah tropis.

Kerja sama penelitian untuk meningkatkan produktivitas sapi di Indonesia melalui pengenalan varietas brahman Kolombia yang cocok untuk iklim tropis di Indonesia serta berbagi pengetahuan dalam bidang *supply chain management* dan pengelolaan akses informasi pasar dunia untuk komoditi florikultura juga disepakati kedua negara dalam pertemuan.

Di samping itu, pertukaran plasma nutfah unggul dari masing-masing negara untuk varietas tanaman kelapa sawit, kopi dan coklat merupakan kesepakatan penting yang turut dicapai guna menyempurnakan varietas kelapa sawit, kopi dan coklat Indonesia yang ada saat ini.

Dalam bidang pengembangan kelapa sawit, kedua negara memiliki kepentingan besar dalam pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan produk kelapa sawit antara lain penurunan kandungan 3-MCPDES DNA glycidyl ester untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk kelapa sawit serta berkomitmen mengembangkan kerja sama pengembangan *next generation biofuel* (biodiesel) berbahan sawit dan sumber minyak nabati potensial lainnya. Melalui *Forum Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC), Indonesia mengajak Kolombia agar berperan aktif untuk bersama-sama melakukan kampanye positif kelapa sawit ke seluruh dunia dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi produk kelapa sawit di pasar internasional, terutama pasar Eropa.

2020

40 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Kolombia

2014

MoU Indonesia - Kolombia on agriculture

US\$ 7,8 M

SURPLUS perdagangan untuk Indonesia (2019)

### TOP TRADE Indonesia - Kolombia

89% Karet      74% Kakao

3,3% Teh      15% Kopi

1,4% Kelapa Sawit      8,4% Kulit&Jangat

## Indonesia Dorong Investasi Swiss Untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian Nasional



Courtesy call Mentan RI dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, H.E. Kurt Kunz, (18/08/20)

### TOP TRADE Indonesia - Swiss

**49%** Minyak Atsiri  
**36%** Kakao

**16%** Panili  
**15%** Tembakau

**9,7%** Kelapa Sawit  
**14%** Obat Hewan

Menteri Pertanian RI menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Swiss untuk Indonesia, H.E. Kurt Kunz, pada tanggal 18 Agustus 2020 di Jakarta. Fokus pembahasan terkait fasilitasi akses pasar komoditas pertanian Indonesia, seperti kelapa sawit, nenas, kakao, kopi, dan rempah-rempah ke pasar Swiss sebagai hub bagi negara-negara di kawasan Eropa.

Indonesia berharap hambatan perdagangan kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa tidak berimbas terhadap akses pasar kelapa sawit Indonesia di Swiss. Sebagai salah satu komitmen terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 mengenai sistem dan prosedur sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan.

Hingga saat ini Indonesia dan Swiss belum memiliki payung kerja sama bilateral bidang pertanian. Untuk itu, Mentan RI mendorong kerja sama dengan mengundang perusahaan Swiss untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan Indonesia serta berinvestasi di sektor hortikultura, perkebunan, tanaman pangan dan peternakan.

Investasi diantaranya: (i) teknologi perbenihan hortikultura dan pengembangan kawasan hortikultura yang berdaya saing dan ramah lingkungan; (ii) budidaya perbibitan sapi perah dan sapi potong, serta industri pengolahan susu segar; serta (iii) pengembangan jagung yang rendah aflatoksin. Indonesia juga mendorong kerja sama regenerasi petani dan revitalisasi penyuluh pertanian serta pemanfaatan teknologi digitalisasi pertanian guna mendorong peningkatan tiga kali lipat ekspor pertanian Indonesia ke negara-negara mitra.

Dubes Swiss menyampaikan agar Indonesia dapat mendukung kebijakan yang berbasis kepastian hukum dan transparansi. Mentan RI menyampaikan komitmennya untuk mendorong peningkatan investasi asing melalui dukungan kebijakan yang berdasarkan pada prinsip kepastian hukum sehingga mobilisasi investasi dan kerja sama teknis dengan negara mitra strategis dapat terealisasi dengan baik, termasuk dengan Swiss. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting bagi kedua belah pihak guna merancang kerja sama konkret dan *applicable* yang melibatkan pelaku usaha Indonesia dan Swiss secara langsung.

## Brief Update Penguatan Akses Pasar dengan Negara Mitra

Di tengah situasi pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian c.q Biro Kerja Sama Luar Negeri terus berupaya memfasilitasi penguatan akses pasar komoditas pertanian Indonesia di negara-negara mitra, melalui partisipasi dalam forum bilateral bidang pertanian, forum perundingan perdagangan bilateral, serta koordinasi melalui pertemuan virtual dengan para pihak terkait di negara mitra yang terangkum sebagai berikut:

Melalui perundingan perdagangan bilateral *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia-Tunisia, Indonesia mendorong akses pasar produk sawit dan turunannya, produk makanan/minuman dan olahannya (kopi, kakao, teh, mie instan, rumput laut, ikan, buah-buahan, dsb), karet, kertas, produk dari kaca, produk dari kayu (*furniture*), tekstil dan produk tekstil, serta obat-obatan.

Khusus komoditas pertanian, Indonesia telah mengajukan 42 pos tarif (PT), seperti kelapa sawit dan lada. Kementerian Pertanian pun secara khusus mendorong akses pasar kelapa sawit yang merupakan ekspor utama Indonesia ke Tunisia. Ekspor utama komoditi pertanian Indonesia ke negara Tunisia yaitu kelapa sawit dengan nilai USD 39,8 juta (90,98%), kelapa dengan nilai USD 2,5 juta (5,83%), cengkeh (1,05%), kacang mede (0,86%), dan tembakau (0,50%).

*Market share* produk komoditas sawit Indonesia di pasar Tunisia hanya sebesar 0,3%. Dengan demikian dengan didorongnya akses pasar bagi kelapa sawit, diharapkan Indonesia dapat menambah *market share* kelapa sawit di Tunisia.

Melalui PTA Indonesia – Tunisia, daya saing produk Indonesia di pasar Tunisia diharapkan dapat semakin meningkat dengan diturunkannya tarif bea masuk Tunisia yang masih tinggi. Tunisia ke depan diharapkan dapat menjadi *hub* produk Indonesia ke negara-negara Timur Tengah lainnya.

### Tunisia

Dalam upaya menembus pasar Qatar, Kementerian Pertanian mengadakan pertemuan koordinasi dan webinar virtual untuk mengidentifikasi peluang pasar produk Indonesia di negara Qatar yang merupakan negara kaya dengan sumber pemasukan utama dari sektor migas (70%). Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP tergolong sangat kecil (0,2%) mengingat minimnya lahan pertanian dan iklim yang tidak mendukung.

### Qatar

Dilihat dari kinerja perdagangan secara keseluruhan, ekspor produk pertanian Indonesia ke Qatar relatif masih kecil. Pada tahun 2019 hanya mencapai USD 168,394 juta, yang meliputi: arang kelapa (HS 440290) dengan nilai USD 3,224 juta, kelapa kering (HS 080111) dengan nilai USD 1,147 juta (menguasai pasar Qatar sebesar 94%), cokelat (HS 1806) dengan nilai USD 485 ribu, cengkeh (HS 090710) dengan nilai USD 327 ribu, minyak sawit (HS 151190) dengan nilai USD 317 ribu, dan kelapa segar (HS 080119) dengan nilai USD 231 ribu.

Untuk komoditas lainnya, Kementerian Pertanian terus berupaya untuk menyoal pasar Qatar yang memiliki banyak peluang bagi komoditas-komoditas pertanian Indonesia.

Melalui pertemuan ke-16 Forum Kerja Sama Agribisnis Indonesia-Singapura atau *Agribusiness Working Group Meeting* Indonesia-Singapore (IS-AWG), Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan akses pasar produk pertanian ke Singapura, terutama komoditas hortikultura. Pada tahun 2019, produk hortikultura berkontribusi sebesar 10% atau USD 31,4 juta dari total nilai ekspor USD 314,5 juta. Nilai tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 33,8 juta. Dalam lima tahun terakhir, volume impor Singapura atas sayuran dan buah-buahan Indonesia cenderung menurun. Dalam hal ini, tantangan bagi Indonesia adalah meningkatkan volume dan ragam produk ekspor ke Singapura.

Forum IS-AWG diharapkan dapat memfasilitasi upaya meningkatkan kerja sama agribisnis di kedua negara termasuk melalui kesepakatan pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan yang ada selama ini, baik dari sisi logistik dan transportasi.

## Singapura

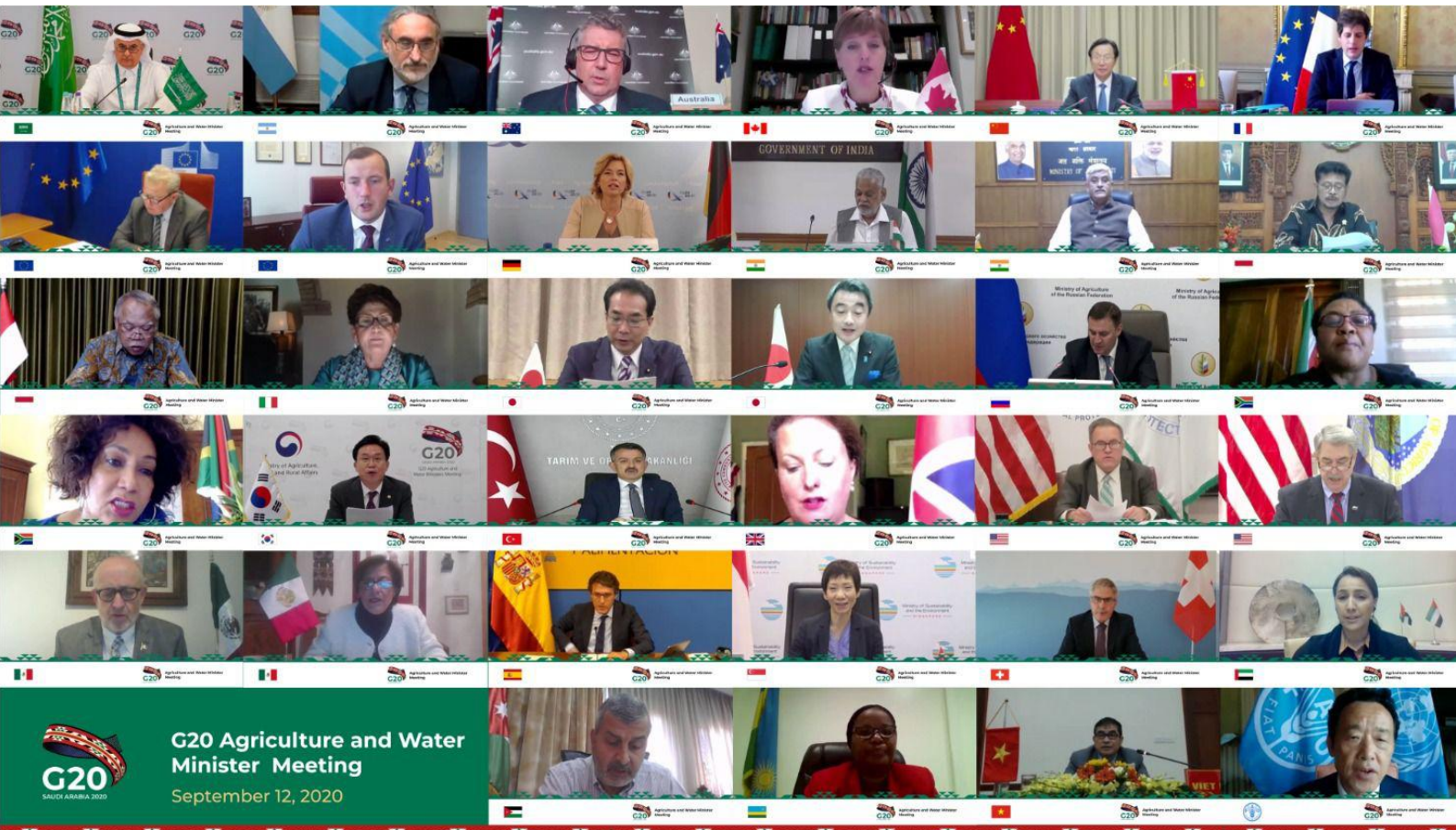
## Tiongkok

Kementerian Pertanian terus berupaya menyelesaikan hambatan-hambatan perdagangan ke negara-negara mitra, seperti Tiongkok. Pada bulan Juni 2020, seluruh pelabuhan pemasukan di Tiongkok melaksanakan rekomendasi dari *Import and Export Food Safety Department of the General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) melalui *Notice on Stopping Release of Imported Konjac Chips* untuk melakukan penolakan atas produk *konjac chips* dari Indonesia karena dianggap tidak sejalan dengan *Food Safety Law* sehingga masih memerlukan *risk assessment* oleh GACC. Hal ini dilakukan tanpa ada *Notification of Non Compliance* (NNC) dari Tiongkok terkait hal tersebut.

Penolakan ini jelas telah menghambat ekspor porang ke Tiongkok dan merugikan petani skala kecil Indonesia. Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, total ekspor porang ke Tiongkok pada tahun 2018 adalah 839 ton. Ekspor porang ke Tiongkok meningkat tajam pada tahun 2019 menjadi 8,3 ribu ton dengan nilai mencapai USD 24,8 juta dengan *market share* saat ini sebesar 55,23%. Untuk menyelesaikan hambatan ini, Kementan bersama KBRI Beijing melakukan negosiasi dengan pihak GACC, termasuk melalui penyusunan informasi teknis produk *konjac chips* Indonesia untuk *risk assessment* oleh GACC, merujuk daftar pertanyaan kuesioner GACC.

Melalui forum perundingan perdagangan ke-3 *Trade Negotiating Committee (TNC) Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan secara virtual pada tanggal 21-22 Oktober 2020, Kementerian Pertanian melakukan penguatan akses pasar komoditas pertanian ke Bangladesh dengan negosiasi penurunan bea masuk ke Bangladesh. Beberapa komoditas pertanian tersebut, di antaranya madu alam, kopi, pala, teh, jahe, beras, dan minyak sawit. Pada tahun 2019, neraca perdagangan kedua negara mengalami surplus sebesar USD 756 juta bagi Indonesia. Ekspor utama komoditas pertanian Indonesia ke Bangladesh dengan nilai terbesar pada tahun 2019 adalah kelapa sawit (USD 710 juta), kelapa (USD 15 juta), pinang (USD 12 juta), kapas (USD 5 juta), pala (USD 2 juta). Impor utama komoditas pertanian dari Bangladesh adalah tembakau (USD 4 juta), serat USD (265 juta), kapas (USD 152 juta).

## Bangladesh



## Mentan RI Paparkan Kebijakan dan Capaian Sektor Pertanian di G-20

Menteri Pertanian RI hadir dalam pertemuan *Agriculture and Water Ministers Meeting (AWMM) G20* Presidensi Arab Saudi 2020 yang berlangsung secara virtual pada tanggal 10-12 September 2020 *back to back* dengan *Agriculture and Water Deputies Meeting*.

Mentan menyampaikan peran sektor pertanian di Indonesia yang cukup signifikan terlihat dari kontribusinya terhadap total PDB mencapai 14% (2019) dan menyediakan lapangan kerja bagi hampir separuh total penduduk. Seiring dinamika pembangunan wilayah, di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan, pemberian perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional.

Para Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air negara anggota G20 mengakui pentingnya mengintensifkan upaya menuju ketahanan pangan dan nutrisi serta menuju pengelolaan air yang berkelanjutan dan tangguh di semua tingkat yang sesuai dan memperkuat kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai tujuan bersama.

“ We, the G20 Agriculture and Water Ministers, acknowledge the importance of intensifying our efforts towards food security and nutrition and towards sustainable and resilient water management including through the exchange of best practices, at all appropriate levels and strengthening our cooperation with relevant stakeholders to achieve common goals. ”

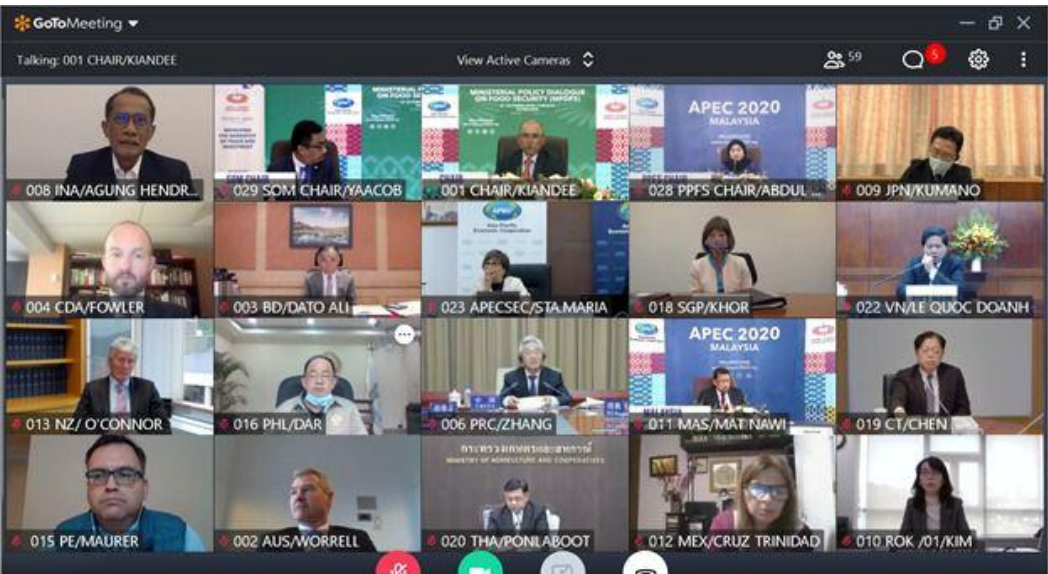
COMMUNIQUE  
G20 Agriculture and Water Ministers  
November 22, 2020

Pandemi Covid-19 telah mengganggu perdagangan dan rantai pasok pangan yang menyebabkan kekurangan pangan dan berdampak buruk terhadap nutrisi. Untuk itu, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) melakukan Pertemuan Virtual Tingkat Menteri terkait Ketahanan Pangan pada tanggal 27 Oktober 2020. Pertemuan dihadiri 21 anggota Ekonomi dan berhasil menyepakati deklarasi pernyataan bersama. Hal ini sebagai komitmen untuk mendorong kolaborasi dan kerja sama antar Ekonomi dan fora APEC untuk membantu memastikan pangan yang cukup, aman, terjangkau, dan bergizi tersedia dan dapat diakses oleh semua orang, serta berupaya untuk mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan di setiap tahap rantai pasok pangan baik di masa pandemi Covid-19 maupun seterusnya.

Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, menyampaikan bahwa Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta ketahanan gizi masyarakat dengan menjaga kapasitas dan kapabilitas produksi petani dan nelayan; menyusun peraturan pelaksanaan untuk memfasilitasi kelancaran arus perdagangan produk pangan dan pertanian; memastikan untuk mengurangi gangguan rantai pasok pangan; memberikan bantuan uang tunai dan pangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk petani dan nelayan; dan mendukung kemitraan dengan sektor swasta.

Rangkaian Pertemuan Virtual APEC Ketahanan Pangan dimulai dari bulan September hingga Oktober 2020, yang terdiri dari *Agricultural Technical Cooperation Working Group* (ATCWG), *APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology* (HLPDAB) dan *APEC Policy Partnership on Food Security* (PPFS). Pertemuan Menteri terkait Ketahanan Pangan merupakan pertemuan tahunan perhelatan puncak dari seluruh rangkaian, yang mengesahkan pernyataan bersama para menteri APEC terkait ketahanan pangan. Rangkaian pertemuan APEC selanjutnya akan dilaksanakan secara daring oleh New Zealand selaku tuan rumah APEC 2021.

## APEC Deklarasikan Pernyataan Bersama Perkuat Rantai Pasok Pangan dan Ketahanan Pangan di Masa Pandemi Covid-19



“ We are committed to further strengthening cooperation in relevant fields, especially the food standards and safety assurance connectivity to assure safety, enhance productivity, build capacity and reduce barriers to food trade. ”

VIRTUAL MINISTERIAL POLICY DIALOGUE ON FOOD SECURITY STATEMENT ON COVID-19

## Penguatan Tata Kelola Global untuk Ketahanan Pangan dan Gizi di Forum FAO

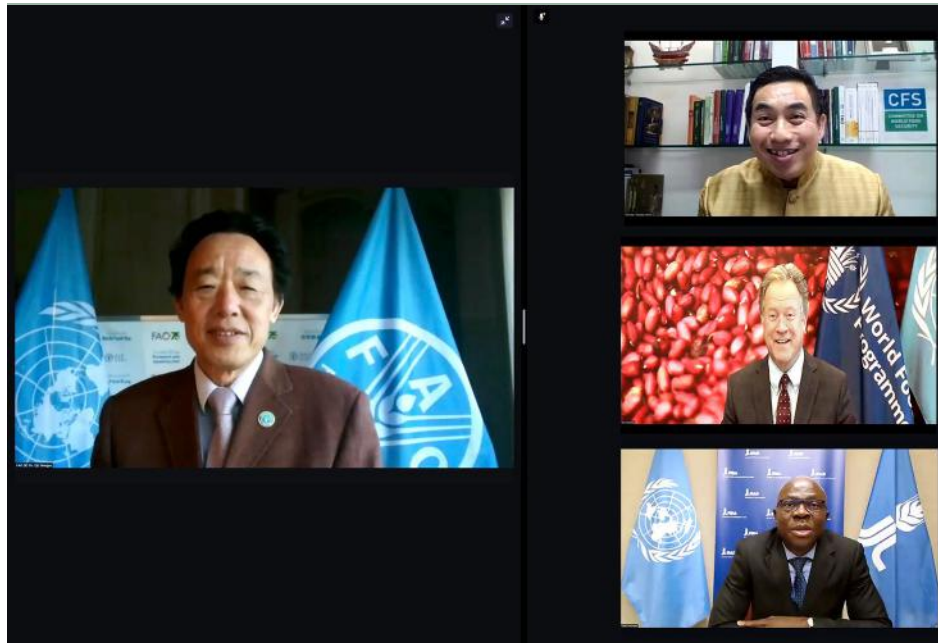
### CFS High-Level Special Event

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertanian menyampaikan berbagai kebijakan dan capaian program strategis dalam menjamin ketahanan pangan nasional, utamanya di tengah kondisi pandemi global Covid-19. Hal ini dipaparkan pada sesi *Ministerial Roundtable* Pertemuan Khusus Tingkat Tinggi Komite Ketahanan Pangan Dunia (*Committee on World Food Security/CFS*) yang diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 Oktober 2020 secara virtual. CFS merupakan platform *multi-stakeholder* terbesar di dunia yang fokus pada ketahanan pangan.

Pertemuan dilakukan guna membahas upaya-upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan global (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pertemuan tersebut juga secara khusus diselenggarakan sebagai pengganti Sidang Pleno CFS sesi ke-47 yang telah dijadwalkan ulang menjadi 8 – 12 Februari 2021 akibat pandemi Covid-19.



Mentan RI sebagai speaker Sidang CFS (13/10/20)



Dirjen FAO, Chairperson CFS, Executive Director WFP, President IFAD pada sesi pembukaan CFS High-Level Special Event (13/10/20)

### FAO Regional Conference for Asia and the Pacific ke-35

Menteri Pertanian RI hadir pada virtual meeting Tingkat Menteri ke-35 Konferensi Regional FAO untuk wilayah Asia Pasifik, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 3 September 2020.

Dalam konferensi yang diketuai oleh Pemerintah Kerajaan Bhutan, Mentan menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional khususnya menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, sektor pertanian juga sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan serta meningkatkan pendapatan untuk keluarga petani. Mentan turut mengapresiasi peran FAO dalam mempromosikan dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, serta mengembangkan strategi dan program untuk ketahanan pangan global.

Ke depan, Indonesia akan terus bersinergi dengan FAO serta dua Badan PBB bidang pangan dan pertanian lainnya yang berbasis di Roma (*International Fund for Agricultural Development/IFAD* dan *World Food Program/WFP*) dalam menangani dampak krisis akibat Covid-19 pada sistem pangan serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

Pertemuan *FAO Regional Conference for Asia and the Pacific* berikutnya disepakati akan diselenggarakan di Bangladesh pada tahun 2022.

“ Kami mengapresiasi peran FAO dalam mempromosikan dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan, serta mengembangkan strategi dan program untuk ketahanan pangan global. ”

Mentan RI



Mentan RI sampaikan statement pada Sidang FAO APRC-35 (3/09/20)

## FAO Council ke-164 & 165

Pertemuan sesi ke-164 dan sesi ke-165 Dewan FAO secara virtual dihadiri oleh lebih dari 350 perwakilan peserta yang merupakan perwakilan seluruh 49 negara anggota *Council* serta negara-negara anggota FAO lainnya sebagai peninjau (*observers*). Sesi ke-164 dilakukan pada 6-10 Juli 2020, sedangkan sesi ke-165 pada 30 November-4 Desember 2020.

Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan pada kedua sesi. Dubes RI Roma bertindak sebagai *alternate Head of Delegation* (HoD) dan dalam kapasitas sebagai Ketua G-77 dan Tiongkok *Chapter Roma*.

Sidang membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran 2020-2021; capaian kinerja FAO 2018-2019; Inisiatif pembentukan Platform Internasional untuk Pangan dan Pertanian Digital; serta dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan global.

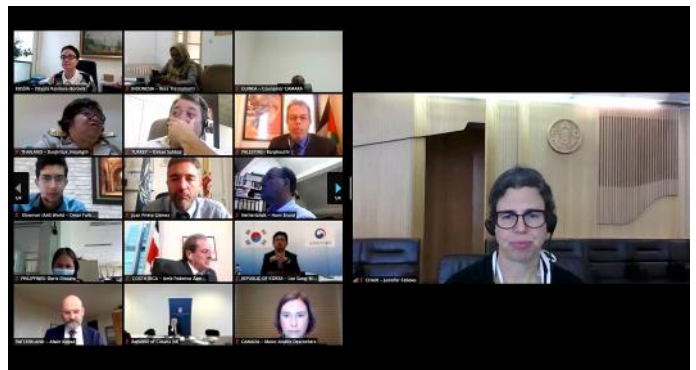


Ka. BKP sebagai Ketua Delri Sidang FAO Council-164 & 165

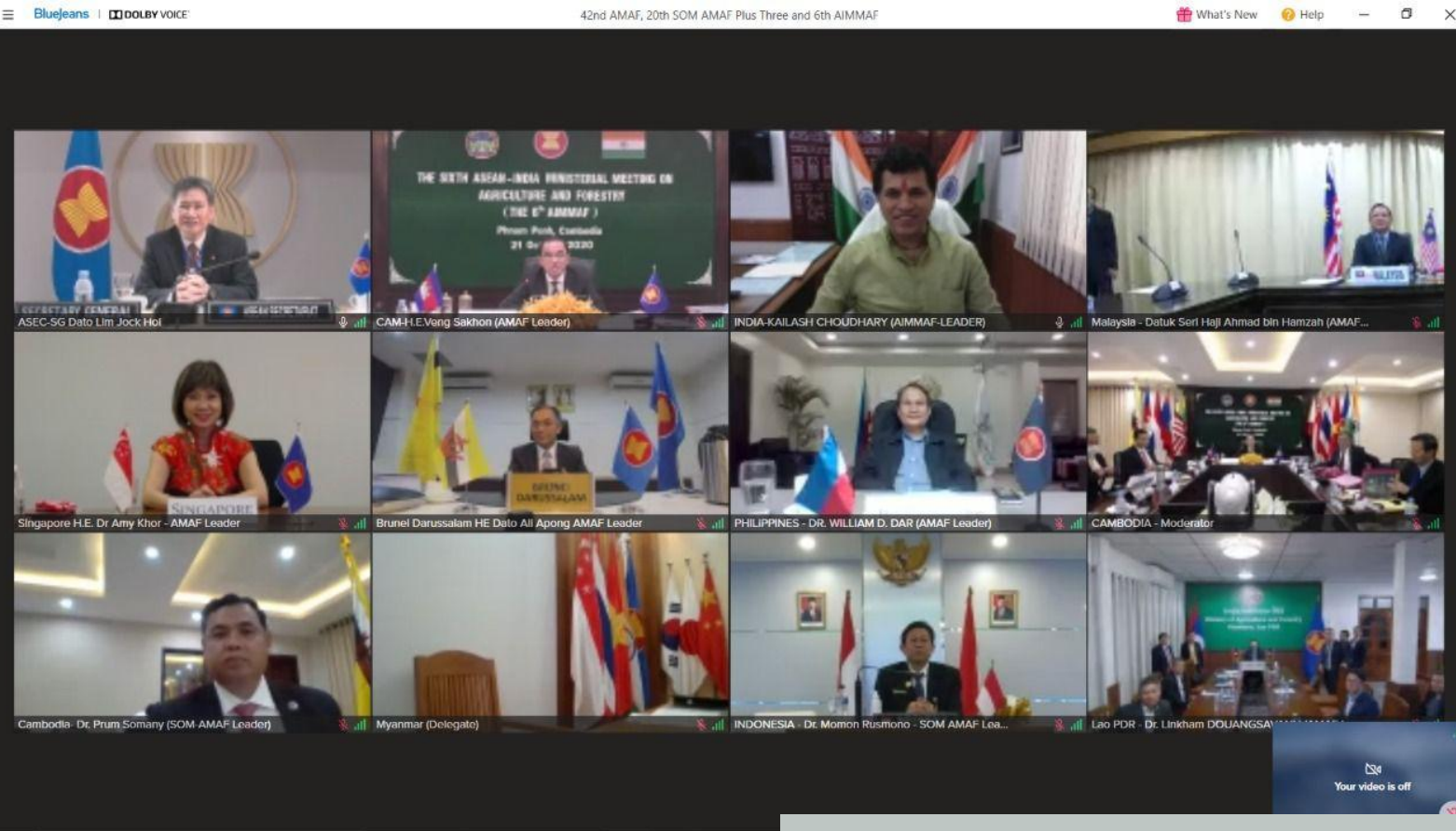
Indonesia diharapkan menindaklanjuti inisiatif pengembangan *food systems* dalam mendukung UN *Food Systems Summit* dan mendorong *joint programmes* dengan UN *Rome-Based Agencies* Indonesia. Indonesia juga perlu mengawal tindak lanjut pembentukan *International Platform for Digital Food and Agriculture* sebagai wadah pertukaran keahlian dan informasi dalam mengembangkan sistem pertanian berbasis teknologi digital.

## FAO Committee on Agriculture (COAG) KE-27

Sidang virtual FAO *Committee on Agriculture* (COAG) ke-27 telah diselenggarakan pada 28 September-2 Oktober 2020 bertemakan *Sustainable Livestock for SDGs*. Pertemuan membahas 23 mata agenda, diantaranya agenda *Livestock sector contributions to achieving the SDGs*. Delri menyampaikan upaya pengembangan sektor peternakan dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Delri juga mendukung pembentukan *sub-committee of livestock*. Pada agenda *Voluntary Code of Conduct for Food Loss and Waste Reduction (FLW)*, Delri menyampaikan upaya yang telah dilakukan di tingkat nasional terkait FLW dan meminta FAO dapat terus memberikan bantuan teknis dalam penanganan FLW khususnya dalam masa pandemi Covid-19.



Delri Kementan mengikuti Sidang COAG-27 (28/09/20)



## Ketahanan Pangan Regional ASEAN di Tengah Pandemi Covid-19

Seiring dinamika pembangunan wilayah regional dan keterbatasan akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan, memberikan perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementan saat mengikuti pertemuan Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN ke-42 (*the 42nd ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry/42nd AMAF*) secara virtual pada 21 Oktober 2020 dengan Kamboja selaku tuan rumah. Pertemuan AMAF ke-42 didahului dengan pertemuan tingkat *Senior Official* sehari sebelumnya.

Pembahasan agenda utama pada pertemuan AMAF tahun ini adalah upaya-upaya penanggulangan Covid-19 oleh masing-masing negara dalam mengurangi dampak pandemi pada sektor pangan, pertanian, dan kehutanan kaitannya terhadap keamanan dan ketahanan pangan.

### AMAF ke-42

Pada pertemuan AMAF ke-42, Indonesia menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Umum PBB ke-75 yang lalu dengan mengajak seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu padu dan berkolaborasi dalam penanganan Covid-19, menghindari persaingan dan mengedepankan *win-win solution*. Selain itu, kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan. Langkah ASEAN dalam menyusun *ASEAN Comprehensive Recovery Framework* (ACRF) menjadi bukti keseriusan bersama dalam menciptakan ASEAN yang sehat dan produktif.

Pada kesempatan ini, Indonesia juga menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah rangkaian pertemuan AMAF ke-43, yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada bulan Oktober 2021.

## AMAF PLUS THREE (China, Jepang dan Korea) ke-20

Pertemuan AMAF ke-42 ini merupakan rangkaian pertemuan yang tidak hanya melibatkan 10 negara anggota ASEAN. Pertemuan ini juga dilaksanakan secara *back to back* dengan pertemuan *AMAF Plus Three* (AMAF+3) ke-20 yang melibatkan negara China, Jepang dan Korea, serta pertemuan AIMMAF ke-6 yang melibatkan negara India.

Pada pertemuan AMAF+3, para Menteri AMAF+3 mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh negara ASEAN dalam menanggulangi pandemi Covid-19, dan menyatakan dukungan dan komitmennya agar bersama-sama menjaga pasokan bahan pangan, keamanan serta ketahanan pangan dikawasan. Di samping itu, pertemuan juga mendorong agar negara *Plus Three* mendukung implementasi *Action Plan on Fall Armyworm 2020-2025*.

## ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture ke-6

Pada pertemuan *ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry* (AIMMAF) disepakati pengaturan ulang pertemuan AIMMAF untuk dilaksanakan dua tahun sekali dengan tetap mendorong kelompok kerja (*working group*) di bawah AIMMAF guna mengkomodasi kerja sama yang sedang berjalan.



Sekjen Kementan mewakili Menteri Pertanian dalam rangkaian pertemuan AMAF

Rangkaian pertemuan AMAF ke-42 menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait acuan kerja sama ASEAN ke depan antara lain:

1. *Key Deliverables for Food, Agriculture and Forestry 2021*;
2. *Mid-Term Review (MTR) of the Vision and Strategic Plan for ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (SP-FAF) 2016-2025 and Sectoral Plans of Action (SPAs) 2016-2020*;
3. *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN region (SPA-FS), 2021-2025*;
4. *ASEAN Regional Guideline for the Implementation of International Standards related to Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures dan SPA of the ASCP 2021-2025*;
5. *Plan of Action for the ASEAN Cooperation in Halal Food (2021-2025)*;
6. *Plan of Action for the ASEAN Cooperation in Livestock (2021-2025)*; dan
7. *Medium term Plan of Action (POA) for ASEAN-India Cooperation in Agriculture and Forestry for 2021-2025 and ASEAN-Russia Agriculture and Food Security Cooperation Work Programme (2021-2025)*.



Sekjen Kementan bersama anggota Delri Sidang AMAF ke-42 (21/10/20)



“Visi Kementan untuk mengalihkan pendekatan berbasis produksi ke pendekatan *food systems* selaras dengan yang sudah dicanangkan oleh PBB untuk mencapai produksi pangan berkelanjutan dan gizi yang sehat”

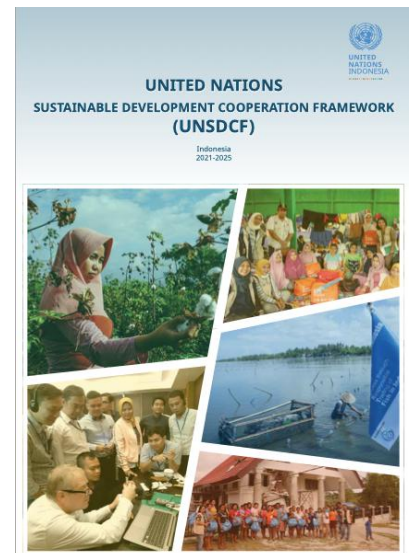
Valerie Julliand  
UNRC Indonesia

## Penguatan Kerja Sama dengan Koordinator Badan-Badan PBB di Indonesia (*United Nations Resident Coordinator*)

Menteri Pertanian RI menerima *courtesy call* Koordinator Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations Resident Coordinator/UNRC*) yang dilakukan secara virtual pada tanggal 20 November 2020.

UNRC merupakan pejabat tinggi yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan operasionalisasi 27 Badan PBB yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Badan PBB yang menjadi mitra utama Kementan adalah: (i) *Food and Agriculture Organisation* (FAO); (ii) *International Fund for Agricultural Development* (IFAD); (iii) *World Food Programme* (WFP); dan (iv) *United Nations for Development Programme* (UNDP). Mrs. Valerie Julliand selaku UNRC yang baru untuk Indonesia telah menerima surat *credential* dari Kementerian Luar Negeri untuk penugasan di Indonesia pada awal bulan November 2020.

Dalam pertemuan dibahas: (1) Dukungan PBB kepada Pemri, khususnya untuk sektor pertanian; serta (2) Kontribusi PBB dalam pemulihan pasca Covid-19 di sektor pertanian. UNRC menyampaikan apresiasi atas kinerja sektor pertanian yang sangat baik khususnya dalam menghadapi krisis Covid-19 dan menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung program pembangunan pertanian secara berkelanjutan di Indonesia, khususnya melalui peningkatan koordinasi di antara badan-badan PBB yang menangani sektor pangan dan pertanian.



Dokumen Kerangka Kerja Sama Pemri dan Badan-Badan PBB di Indonesia, UNSDCF 2020-2025

Kerangka Kerja Sama Indonesia - PBB

2008

Shifting modalitas DARI bantuan langsung MENJADI *policy advocacy*, *capacity building* dan *knowledge sharing*

2010

UNPDF 2011-2015  
Enhance equity; Promote effective participation; Resilience to climate change, threats, shocks and disasters

2015

UNPDF 2016-2020  
Poverty reduction; Social services and social protection; Environmental sustainability; Improved Governance

2020

UNSDCF 2021-2025  
Inclusive Human Development; Economic Transformation; Climate and Disaster Resilience; Innovation to SDGs

# Indonesia Dukung Penggabungan IRRI menjadi *One-CGIAR*, Fokus Implementasi *Workplan 2020-2024*



Foto (ki-ka): Conference call (16/9/20); Penandatanganan Work Plan IRRI - Kementan 2020-2024 (5/9/20)

Menteri Pertanian RI melakukan *conference call* dengan Direktur Jenderal *International Rice Research Institute* (IRRI), Dr. Matthew Morrell, pada 16 September 2020. Pertemuan bertujuan untuk membahas upaya penguatan kerja sama Indonesia dengan IRRI yang mengalami perubahan tata kelola sebagai dampak dari reformasi kelembagaan *Consultative Group on International Research and Development* (CGIAR) menjadi *One-CGIAR*.

Bergabungnya IRRI dengan *One-CGIAR* memiliki beberapa keuntungan, yaitu komoditas dan isu yang menjadi lebih beragam, tidak hanya terbatas pada beras, namun juga termasuk peternakan (*International Livestock Research Institute*). Isu lintas sektor seperti isu kesehatan masyarakat juga dapat lebih diintegrasikan.

*One-CGIAR* tidak hanya difokuskan pada riset dan pengembangan berbasis pertanian, tapi juga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan implementasi kegiatan pembangunan pertanian di Indonesia dan Asia Tenggara, terlebih pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Mentan RI mendukung penggabungan IRRI ke dalam *One-CGIAR* dengan harapan dapat lebih efektif dan kuat dalam memberikan dukungan di sektor pertanian di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dan dengan catatan, program yang sudah ada tidak berhenti dan tetap berjalan seperti yang sudah dirintis sebelumnya.

IRRI melalui *One-CGIAR* akan terus bekerja sama dengan Indonesia, khususnya terkait kegiatan yang disepakati dalam *Workplan* IRRI-Kementan untuk lima tahun ke depan. Mentan menegaskan, kontribusi IRRI sangat besar bagi pencapaian pembangunan pertanian Indonesia selama ini, termasuk di dunia. Hasil riset IRRI menjadi penting bagi masyarakat Indonesia dan Asia Tenggara dalam membangun pertanian secara berkelanjutan.

## Workplan IRRI - Kementan 2020-2024

Rencana kerja (*Workplan*) 2020-2024 bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas sistem pertanian pangan berbasis padi di seluruh nusantara, terutama di daerah dengan produksi padi tinggi. Dengan perkiraan anggaran sekitar USD 6 juta per tahun selama 5 tahun, rencana kerja diharapkan dapat berkontribusi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) dan mendukung capaian Renstra Kementan 2020-2024, khususnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 12%. Rencana kerja juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Rencana Strategis IRRI (2017-2025) dan Program Penelitian CGIAR tentang Sistem Pertanian Pangan Beras 2017-2021 (RICE CRP).

## Kementan Dorong Investasi World Bank untuk Pengembangan Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi



Conference call Mentan RI dan Country Director World Bank (16/9/20)

Menteri Pertanian RI melakukan pertemuan virtual dengan *Country Director World Bank* untuk Indonesia dan Timor Leste yang baru, Ibu Satu Kahkonen, pada hari Kamis, 16 September 2020. Selain sebagai perkenalan, pertemuan juga dimaksudkan untuk membahas *on-going* dan *future collaboration* kerja sama antara Kementerian Pertanian dan World Bank.

Ketahanan pangan dan upaya peningkatan ekspor merupakan isu prioritas kerja sama ke depan. Diharapkan petani dan peternak dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) yang lebih tinggi sehingga dapat menambah penghasilan petani.

Selama pandemi, World Bank melakukan survei bulanan dengan responden rumah tangga. Hasil survey menunjukkan pangan di Indonesia tersedia namun dengan harga yang tidak terjangkau. Harga pangan di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Untuk itu, perlu diformulasikan langkah untuk menurunkan harga, meningkatkan produksi, dan *shifting* ke komoditas yang memiliki nilai tambah lebih tinggi yang akan bermanfaat bagi semua *stakeholder* di sektor pertanian.

Menteri Pertanian pada pertemuan tersebut menyambut baik gagasan tersebut dan mengharapkan adanya penguatan kerja sama Kementerian Pertanian dengan World Bank melalui sebuah proyek pengembangan kawasan percontohan yang dapat menjadi *show windows* usaha pertanian dari hulu ke hilir dengan orientasi ekspor yang fokus pada subsektor hortikultura dan peternakan. Inisiasi kerja sama ini diharapkan menjadi program besar yang fokus pada implementasi di lapangan. Hal ini yang membedakan fokus proyek kerja sama *on-going* dengan World Bank lainnya yaitu proyek I-CARE, dimana proyek I-CARE lebih difokuskan pada pengembangan model kawasan korporasi pertanian melalui analisis dan penelitian.

### Kemitraan Kementerian Pertanian dengan Bank Dunia dari Waktu ke Waktu

**(Juni 1968)**

Kunjungan Presiden Bank Dunia McNamara ke Indonesia

**(September 1968)**

Proyek Pertama Indonesia, Proyek Irigasi dan Rehabilitasi disetujui Bank Dunia

**(Maret 1977)**

Proyek pendanaan sektor nutrisi kerja sama Bank Dunia dengan Kementan, Kemenkes, dan Kemdikbud

**(Desember 2004)**

Instrumen Kebijakan Pinjaman Luar Negeri Indonesia untuk tujuan Pembangunan disetujui oleh Bank Dunia

**(Agustus 2006)**

Bank Dunia memberikan bantuan USD 15 Juta untuk membantu penanganan Flu Burung (Avian Influenza) di Indonesia

**(2007)**

Proyek Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI) hingga 2012

**(September 2012)**

Proyek *Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)* hingga 2019

**(Desember 2014)**

Proyek *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)* hingga 2024

Menteri Pertanian RI menyambut baik komitmen perusahaan asal Rusia yaitu Artis Internasional Pte. Ltd untuk berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan komoditas gandum, jagung dan stevia. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian RI pada pertemuan tanggal 29 September lalu yang dilaksanakan secara virtual. Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian RI menekankan pentingnya investasi karena dapat menunjang industri pangan dan pakan nasional.

Sebagai langkah awal merealisasikan rencana investasi tersebut, Artis Internasional Pte. Ltd telah menyampaikan kebutuhan lahan atas investasi tersebut yakni sebesar 100.000 ha. Menurut Artis Internasional Pte. Ltd, luasan lahan tersebut diperlukan agar dapat memenuhi aspek kelayakan secara finansial dan ekonomi.

Kondisi lahan yang diperlukan, yaitu:

1. Permukaan tanah datar maksimum lereng 15 derajat (atau maksimum 26.8%);
2. Ketinggian dari 50 meter di atas permukaan laut (gandum dan jagung) dan 400 meter di atas permukaan laut untuk stevia;
3. Tanah lempung dengan PH 5.5 – 6.5 (PH Netral);
4. Tekstur tanah liat 35%-45%, pasir 15 % - 30 % berdebu 15% - 30% tidak ada genangan air;
5. Area tanah tidak kurang dari 20.000 pada tahap awal, secara inkremental pengembangan lahan membutuhkan 100.000 hektar;
6. Infrastruktur seperti akses jalan, bandara, listrik, ketersediaan air dan lain-lain.



Conference call Mentan RI dan Artis International Rusia (29/9/20)

## Investor Swasta Rusia, Artis International Pte, Ltd., Tindaklanjuti Rencana Pengembangan Gandum, Jagung dan Stevia

Untuk mempersiapkan rencana kunjungan tersebut, Menteri Pertanian RI telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menyiapkan data pendukung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Artis International Pte.Ltd. Sehingga dapat segera dilakukan penyusunan rekomendasi implementasi investasi berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan serta pemetaan *business process* realisasi investasi sesuai regulasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterapkan untuk sektor pertanian.

Di samping itu, penyusunan MOU kesepakatan investasi dengan fokus pada hak dan kewajiban kedua pihak sesuai komitmen kontribusi yang disepakati juga dapat segera dilakukan.

Kajian identifikasi lahan telah dilakukan di Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan Sumatera yang meliputi identifikasi situs lokasi, pengumpulan data lahan dan iklim lokasi, pengumpulan informasi terkait aspek legal lahan dan struktur kepemilikan serta survei lahan di lokasi potensial. Namun hasil kajian dianggap masih belum sesuai dengan karakteristik lahan yang dibutuhkan oleh pihak Rusia. Untuk itu, Mentan RI mengusulkan lokasi baru di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur yang dinilai mampu menyediakan luasan lahan dan karakteristik sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebagai tindak lanjut, perusahaan Rusia direncanakan akan berkunjung ke Indonesia untuk melakukan survey lapangan di usulan lokasi baru tersebut.

## Penguatan Kerja Sama Teknis Komoditas Berorientasi Ekspor dengan Selandia Baru

Dalam rangka penguatan kerja sama bidang pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Dr. Momon Rusmono, melakukan pertemuan virtual dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Dr. Jonathan Austin, pada 13 Oktober 2020. Sekjen Kementan menyampaikan apresiasi atas komitmen Selandia Baru untuk terus memperkuat kerja sama sektor pertanian, khususnya dalam aspek kerja sama teknis dan investasi bagi pengembangan komoditas-komoditas berorientasi ekspor, serta perluasan kesempatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program-program beasiswa dan pelatihan khusus bagi Kementerian Pertanian.



Conference call Sekjen Kementan dan Dubes New Zealand untuk Indonesia (13/10/20)

2012

MoU Kerja Sama Indonesia - Selandia Baru Bidang Pertanian

2018

the 3rd Agriculture Working Group Indonesia - Selandia Baru

### TOP TRADE Indonesia - Selandia Baru

49%  
Kelapa Sawit

36%  
Pakan Hewan

16%  
Kakao

15%  
Bawang Bombay

9,7%  
Nanas

14%  
Apel

Salah satu kerja sama bidang pertanian yang telah dilaksanakan, yaitu *Indonesian Dairy Excellence Activity (IDEA)*, untuk meningkatkan imbalan hasil (return) bagi peternak sapi perah melalui pengembangan industri persusuan di Indonesia. Indonesia mengusulkan untuk melanjutkan pelaksanaan proyek IDEA fase kedua, dengan menambahkan lokasi di Jawa Tengah dan penguatan feed laboratory.

Dalam hal perdagangan komoditas pertanian, Selandia Baru merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai USD 228 juta pada tahun 2019 dengan nilai defisit bagi Indonesia sebesar US 9,8 juta. Untuk itu, Indonesia mengharapkan komitmen Selandia Baru untuk dapat memberikan perluasan akses pasar bagi Indonesia dan pendampingan bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sebagai mitra dagang, Dubes Selandia Baru mengharapkan proses yang lancar dalam hal perizinan impor produk hortikultura Selandia Baru ke Indonesia. Sekjen Kementan sangat memahami perhatian Selandia Baru terhadap proses penerbitan Rekomendasi Produk Impor Hortikultura (RIPH) di Indonesia yang mempengaruhi kinerja ekspor Selandia Baru ke Indonesia. Kementan berkomitmen untuk terus menyempurnakan prosedur dan regulasi merujuk pada aturan *World Trade Organization (WTO)*. Sekjen Kementan juga menyampaikan harapan agar Indonesia dan Selandia Baru dapat segera kembali melakukan pertemuan *Agriculture Working Group (AWG)*, yang telah rutin terjalin, untuk mengkonkretkan hal-hal yang telah disepakati dalam pertemuan ini.



Conference call Mentan RI dan UNDP Resident Representative untuk Indonesia (4/11/20)

Pada tanggal 4 November 2020, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian didampingi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri telah menerima permohonan *courtesy call* UNDP Deputy Resident Representative, Mrs. Sophie Kemkhadze, yang dilakukan secara virtual. Pertemuan juga dihadiri oleh Mr. Yusuke dari UNDP Regional Bangkok dan Mr. Andrys dari UNDP Indonesia.

Pertemuan bertujuan untuk membahas update perkembangan dan kemajuan usulan proyek *“Building the Climate Resilience of Smallholder Farmers in Nusa Tenggara Timur”* yang diajukan oleh UNDP melalui mekanisme pendanaan hibah *Green Climate Fund* (GCF). Secara khusus, pertemuan dimaksudkan oleh UNDP untuk mengeksplorasi peluang *additional co-financing* proyek yang diusulkan.

## Kementan Dukung Program UNDP untuk Peningkatan Ketahanan Iklim Petani NTT

Kementan telah menyampaikan komitmen *co-financing* dimaksud melalui Kemenko Perekonomian selaku *national focal point* kerja sama UNDP dengan Pemerintah Indonesia, selama periode proyek yang diusulkan sebesar IDR 100 Milyar yang akan dialokasikan melalui: (i) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; serta (ii) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; serta poin-poin masukan terhadap draft proposal proyek yang rencananya akan diajukan oleh UNDP ke Sekretariat GCF dalam waktu dekat.

### Building the Climate Resilience of Smallholder Farmers in NTT

Proposed duration: 6 years



## Brief Update Penguatan Kerja Sama Teknis dan Investasi

Di tengah situasi pandemi Covid-19, Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri memfasilitasi beberapa kerja sama teknis dan investasi antara Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan negara-negara mitra.

### Uni Emirat Arab

Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menandatangani 11 kesepakatan kerja sama pada Januari 2020, termasuk kesepakatan penelitian dan investasi di bidang teknologi pertanian antara Badan Litbang Pertanian dengan *Elite Agro Group* (EAG). Dalam skema kerja sama tersebut, Balitbang dan EAG sepakat menggunakan lahan milik Balai Penelitian Sayuran (Balitsa) Lembang untuk dijadikan sebagai *show window* atau *center of excellence* penelitian sayuran dan beri-berian (*berries*, cabai, terong, tomat ceri dan bawang). Luas lahan sebesar 19,5 ha akan disediakan dalam dua tahap, 10 ha dan 9,5 ha. Mekanisme yang akan digunakan adalah skema sewa dan saat ini masih dalam tahap *assessment* hasil penilaian perkiraan sewa lahan yang dilakukan oleh Tim Kementerian Keuangan.

*Agriculture Counselor United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS)* menawarkan kerja sama kepada Kementerian Pertanian pada bidang pakan ternak. Menyambut tawaran tersebut, Kementan telah menyiapkan usulan rencana kegiatan diantaranya: (1) Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Pakan; (2) Penguatan Sistem Jaminan Mutu Pakan; (3) Pelatihan *Good Manufacturing Practice*; (4) Studi dan *Pilot* Proyek Penguatan Sistem Logistik Pakan di Indonesia; (5) Studi dan *Pilot* Proyek Penguatan Pakan Sapi Perah di Sentra Produksi Susu. Proposal rancangan kerja sama dan *agreement* payung kerja sama dengan pihak USDA FAS masih dalam pembahasan internal lingkup Kementan.

### Amerika Serikat

### Taiwan

Kegiatan *Demfarm* Pertanian Terpadu di Kabupaten Karawang merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian RI dengan *Taiwan Economic and Trade Office* (TETO). Penyesuaian *action plan* tahun 2020 masih dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang muncul akibat pandemi Covid-19. Lahan seluas 3 ha dari Dinas Pertanian Kabupaten Karawang kepada Balai Besar Pasca Panen Pertanian telah diserahkan untuk pembangunan *screen house* dan *packing house* oleh *Taiwan Technical Mission*, termasuk optimalisasi operasionalisasi *Rice Milling Unit* (RMU). BB Pascapanen telah menganggarkan kembali penambahan daya listrik untuk RMU pada tahun 2021 sehingga nantinya kinerja RMU akan memberikan hasil yang lebih optimal.

## Korea Selatan

*Development of Modern Agriculture* merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian RI dan *Korea Rural Economic Institute* (KREI) yang bertujuan untuk mengembangkan pertanian modern di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Dengan nilai hibah sebesar USD 350 ribu, kegiatan dilakukan diantaranya melalui *joint research*, *field study*, *invitational training*, dan *workshop*. IRRI juga akan turut berpartisipasi dalam aktivitas *joint research*. Kegiatan rutin *Kapex Training* dan *Kapex Workshop* dilaksanakan pada November 2020 secara virtual.

Selain dengan KREI, Kementan bekerja sama dengan *Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries* (EPIS) dalam proyek *Establishing Real-Time ASEAN Food Security Information System and Developing Human Resource in Indonesia (2nd phase)*. Kegiatan berupa Pengembangan Aplikasi Tebu Online dan Metode Estimasi Luasan Dan Produksi Tebu, dilakukan melalui pembuatan sistem informasi produksi tebu dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petugas yang berperan dalam data dan informasi pertanian. Kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif *ASEAN+3 Food Security Information System* (AFSIS) dan didanai secara hibah oleh Pemerintah Korea Selatan.

*Organic Dairy Farming System* merupakan kerja sama Indonesia-Denmark yang bertujuan untuk pengembangan industri susu organik di Indonesia dengan pendanaan sebesar 8.5 juta DKK (IDR 18 milyar). Kerja sama dilakukan melalui penyusunan kebijakan serta menciptakan jaringan kerja sama antara koperasi peternak dengan *public/private sector* melalui DMDP (*Danish Market Development Partnership*). *Stakeholders* utama dari DMDP di Indonesia adalah PT. Indolakto, Arla Food dan Koperasi Setia Kawan di Pasuruan Jawa Timur. Kerja sama diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan ketersediaan sumber protein hewani di Indonesia dan peningkatan pendapatan peternak.

## Denmark

## Inggris

*Fleming Fund Partnership on Antimicrobial Resistance (AMR) Surveillance in Indonesia* merupakan program bantuan Inggris untuk membantu negara-negara berkembang untuk memerangi resistensi antimikroba. Proyek bertujuan untuk penguatan *surveillance system* pengendalian resistensi antimikroba pada kesehatan manusia dan hewan. Bentuk bantuan adalah hibah senilai 8 juta Poundsterling (sekitar IDR 49,8 milyar) yang disalurkan melalui *DAI-Fleming Fund*, dimana Kementan mempersiapkan proposal diantaranya untuk *procurement* dan *training*. Dalam kerja sama tersebut, *integrated data* pengendalian AMR akan diatur dalam *Joint Agreement* antara Kementan RI dan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pihak Inggris.

# Brief Highlights Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian

## Serah Terima Program Pengembangan Sapi Perah Kerja Sama Mercy-USA dan Kementerian Pertanian

Serah terima hibah program pengembangan sapi perah tahun 2020 dilaksanakan dengan pemberian hibah program secara simbolis dari Mercy-USA kepada Kementerian Pertanian RI dan diteruskan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat hingga kepada Kelompok Peternak Tegal Mandiri.



Diharapkan melalui kerja sama ini akan memperkuat kelompok ternak, meningkatkan produksi dan hasil ternaknya, serta membantu upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ke depan, diharapkan ada pengembangan penerima program hibah di wilayah Jawa Barat lainnya, seperti Bogor, Bandung, Bandung Barat.

## Sidang EB IFAD 130 & 131



Sidang *Executive Board* (EB) IFAD sesi ke-130 dan ke-131 telah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 8-11 September 2020 dan 7-9 Desember 2020. Terkait *Report on the Status of Implementation of the Rural Poor Stimulus Facility (RPSF) and Rural Resilience Programme (RPSF)* sebagai program IFAD untuk penanganan dampak Covid-19, negara anggota mengapresiasi upaya IFAD dan mendorong IFAD untuk terus berkoordinasi dengan organisasi PBB lainnya dalam mendistribusikan bantuan terkait penanganan Covid-19.

*Trade Policy Review* (TPR) Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 9-11 Desember 2020 secara *hybrid* di kantor WTO di Jenewa dan di Bandung, Jawa Barat. Sidang dipimpin oleh *Chairman* Aspelund (Islandia). Delegasi RI diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan. Terdapat 890 pertanyaan dari 30 negara anggota WTO. Pemri telah memenuhi kewajiban menjawab 75% dari total pertanyaan. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang baik dibanding pelaksanaan TPR sebelumnya. Ketua Delri menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan kebijakan dan tindakan perdagangannya guna memperoleh manfaat maksimal yang ditawarkan WTO bersama dengan semua negara anggota.

## Sidang Trade Policy Review Mechanism Indonesia ke-7



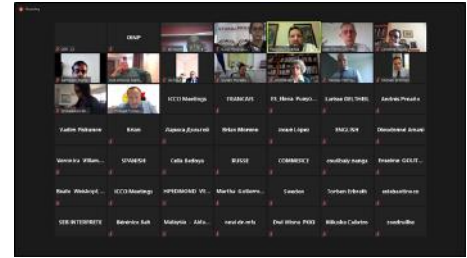
## Sidang Committee on Agriculture - Regular Session (CoA-RS) ke-96



Pertemuan CoA-RS ke-96 diselenggarakan secara *hybrid* di Jenewa dan diikuti secara virtual dari Jakarta pada 30 November - 1 Desember 2020. Sidang dipimpin oleh *Chairperson* Maria A Escandor (Filipina). Delegasi RI dipimpin oleh Kementerian Perdagangan. Dalam agenda *informal meeting*, isu yang dibahas mengenai kepatuhan terhadap implementasi kesepakatan *Tariff Rate Quota* (TRQ) produk pertanian hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Bali yang masih banyak mengalami *underfill*. Sedangkan dalam agenda *formal meeting* beberapa isu yang dibahas diantaranya importasi beras Japonica Jepang, agenda notifikasi *food aid and financial assistance* kepada LDCs dan NFIDCs, dan pemulihan pasca Covid-19.

### Sidang ICCO ke-102

Pertemuan Reguler ke-102 *International Cocoa Organization* (ICCO) dilaksanakan pada 21–25 September 2020 di ICCO *Headquarters*, Abidjan, Pantai Gading, dan secara virtual. Saat ini, jumlah anggota ICCO mencapai 51 negara (21 negara produsen dan 30 negara konsumen). Amandemen *International Cocoa Agreement* (ICA) 2010 masih menjadi agenda pertemuan. Selain itu, rencana pelaksanaan *World Cocoa Council* (WCC) ke-5 dengan Indonesia sebagai tuan rumah yang tertunda akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini turut menjadi pembahasan dalam pertemuan. WCC ke-5 dijadwalkan ulang menjadi tanggal 23--26 Mei 2021, pada 27--29 Mei 2021, di the Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).



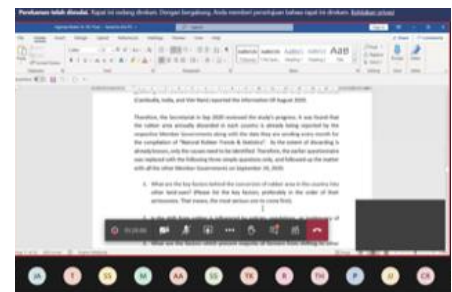
### Sidang ISO Council ke-57



Pertemuan sesi-57 *ISO Council* telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 27 November 2020 dan dihadiri oleh perwakilan negara anggota ISO. Pertemuan berhasil menyepakati keanggotaan baru ISO, penggunaan *reserve fund* untuk menanggung peningkatan biaya kontribusi akibat penunggakan pembayaran kontribusi negara anggota, pemilihan *chairman* serta *vice chairman* *ISO Council* ke-58 dan Komite Administratif 2021 serta penentuan agenda pertemuan yang akan datang. Terkait pembaruan pengangkatan Direktur Eksekutif ISO masih akan dibahas kembali pada pertemuan Dewan ISO pada bulan Juni 2021 mendatang.

### Sidang ANRPC ke-14 of ISC and IMC

Pertemuan ke-14 *Industry Matters Committee* ANRPC dilaksanakan secara virtual pada 18 November 2020. Rapat ke-49 *Executive Committee* telah menyepakati pembentukan Satgas Mekanisme Alternatif Penyelesaian Masalah Harga Karet dalam Jangka Pendek. *Working Group* (WG) untuk *sustainable natural rubber* (SNR) menyampaikan rekomendasi berikut, (1) ANRPC harus memiliki model dasar SNR dengan menetapkan norma, kriteria, dan indikator. Negara-negara anggota akan memiliki fleksibilitas untuk melakukan adaptasi dan memutuskan sertifikasi berdasarkan kondisi setempat. (2) Sekretaris Jenderal sebagai Ketua WG akan mengusulkan rencana aksi WG tahun 2021 dan menetapkan target setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota WG. (3) Sebuah forum bersama ANRPC, *The International Rubber Research and Development Board* (IRRDB), dan *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) harus dibentuk untuk bekerja pada aspek ekonomi SNR.



### The 8th BIMP-EAGA Agribusiness Cluster Virtual Meeting



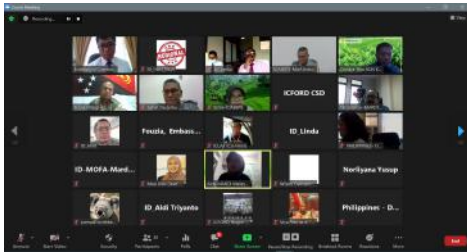
Pertemuan virtual khusus Agroindustri BIMP-EAGA ke-8 telah dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2020. Indonesia menyoroti situasi terkini tentang ketahanan pangan dan pertumbuhan pertanian akibat pandemi Covid-19 serta menyebutkan bahwa koordinasi dan komitmen EAGA yang lebih diperkuat dapat memastikan ketahanan pangan dan saling membantu membangun sektor pertanian. Pertemuan menyepakati Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah pada pertemuan cluster Agribisnis BIMP-EAGA ke-9 pada tahun 2021.

### The 16th Policy Partnership on Food Security

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan beranggotakan unit kerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian. Hasil penting pertemuan PPFs: adopsi laporan *Review of APEC Food Security Roadmap Towards 2020* dan *Second Draft Ministerial Statement on Food Security*. Secara umum masukan Indonesia sudah terakomodasi dengan baik pada *Second Draft Ministerial Statement* tersebut. Hasil pertemuan menjadi masukan substansi pada dokumen pernyataan bersama Menteri negara anggota APEC pada *Ministerial Policy Dialogue on Food Security* tanggal 27 Oktober 2020.



### The First Informal Consultation Meeting SAIRD



Pertemuan dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan dan dihadiri oleh perwakilan negara – negara eks-CAPSA Malaysia, Filipina, Kamboja, Pakistan, Srilanka, Bangladesh dan Papua New Guinea, serta anggota tim *task force* SAIRD dari Indonesia, yaitu Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Biro Hukum Kementan, Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kemensetneg, Sesditjen Kerja Sama Multilateral, Dit. PELH dan Dit. HPE Kementerian Luar Negeri. Pertemuan dimaksudkan sebagai konsultasi dengan negara-negara mitra eks-CAPSA terhadap *concept note* SAIRD yang disesuaikan dengan kajian analisis komparansi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Tim *Task Force* MAMRASCA telah melakukan diskusi terkait isu-isu substantif dalam *Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri-food Standards and Conformity Assessment* (MAMRASCA) melalui pertemuan virtual *the 2nd Consultative Workshop and TF-MAMRASCA* pada 14-16 Juli 2020 dan *the 3rd TF-MAMRASCA* pada 24 September 2020. Masing-masing Negara Anggota ASEAN (AMS) harus menentukan badan sektoral yang ada di negara masing-masing untuk bertanggung jawab dalam struktur tersebut. Secara umum, Indonesia mendukung pembentukan MAMRASCA yang diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing produk agrifood di antara AMS. MAMRASCA diharapkan akan memperkuat akses pasar Indonesia di sektor agrifood lintas ASEAN.

### The 3rd Consultative Workshop and the 4th Task Force Meeting of MAMRASCA



### Preliminary Meeting Consultative Committee on Agriculture (CCA) RI - Brazil



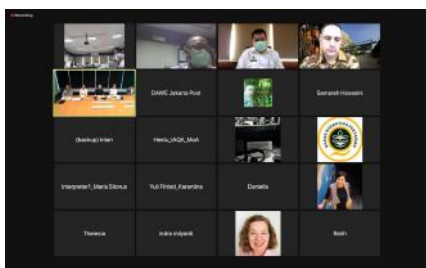
Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pengaktifan kembali forum CCA antara RI dan Brazil yang telah terhenti sejak tahun 2011. Saat ini Brazil menjalin kerjasama dengan lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan sektor pertanian Brazil menyumbang lebih dari 50% total ekspor Brazil. Brazil menilai forum CCA antara Indonesia dan Brazil belum menunjukkan potensi optimalnya, belum cukup mewardahi kepentingan bersama antara kedua negara. Brazil mengharapkan agar CCA dapat mengeluarkan hasil yang konkret berupa proyek bersama dan menjadi wadah yang efektif untuk menyelesaikan *trade related issues* antar kedua negara. Selain itu Brazil mengangkat perlunya disusun *roadmap* yang jelas untuk mengukur capaian CCA.

Pertemuan ke-3 *Trade Negotiating Committee Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement* (TNC-3 IB-PTA) telah dilaksanakan secara virtual pada tanggal 21-22 Oktober 2020. Pertemuan membahas dua agenda utama, yaitu *draft text* perjanjian IB-PTA dan akses pasar. Pertemuan membahas pasal-pasal dalam *draft text* IB-PTA yang belum disepakati pada perundingan sebelumnya. Dari hasil peninjauan keseluruhan isi *draft text* IB-PTA, kedua pihak berhasil menyetujui 14 dari 24 pasal dalam *draft text*. Dalam pembahasan akses pasar, Indonesia meminta penurunan tarif bea masuk untuk 55 pos tarif komoditas pertanian, di antaranya madu alam, kopi, pala, teh, jahe, beras, dan minyak sawit.

**Trade Negotiating Committee  
Indonesia-Bangladesh Preferential  
Trade Agreement ke-3**



**Intersessional Meeting of Task  
Force on Crops and Plant Products,  
Indonesia-Australia Working Group  
on Agriculture, Food, and Forestry  
Cooperation (WGAFFC)**



Delegasi RI pada WGAFFC dipimpin oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh *Assistant Secretary, Plant Import Operations*, DAWE. Agenda pertemuan membahas kebijakan saat pandemi Covid-19, kerja sama *phytosanitary treatments*, serta akses pasar. Pertemuan menyepakati: (a) Terkait Merah Putih *irradiation facility*, BATAN telah melakukan perbaikan fasilitas serta dokumen sistem mutu. BATAN masih memproses sertifikasi ISO 14470 - *Food Irradiation & ISO 13370 - Food health*; (b) Indonesia mendukung “*fully implementation of e-Cert*” antar kedua negara. Indonesia akan melakukan *trial implementasi full e-Cert* pada 5 (lima) pelabuhan utama; (c) Indonesia meminta Australia segera memproses akses pasar *decrowned pineapple*, pisang, dan wasabi segar; (d) Terkait *Tasmania fruit fly Pest Free Area*, Indonesia meminta Australia untuk mengirimkan hasil investigasi terkait temuan lalat buah yang datang dari negara bagian lain. *Food Safety Country Recognition Agreement*, Australia sedang melengkapi dokumen terkait dan akan menyampaikannya ke Indonesia.

Pertemuan diikuti oleh delegasi dari tiga negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand beserta *secretariat Center for IMT* (CIMT) dengan agenda utama yaitu laporan pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh CIMT, *review* dan *progress report* pelaksanaan IMT-GT *blueprint* tahun 2017-2021, pengajuan *project proposal* baru dari negara anggota, pemaparan pembuatan IMT-GT *e-Commerce Platform*, serta persiapan pelaksanaan *26th Ministerial Meeting*. Pada pembahasan IMT-GT *e-commerce platform* sebagai wadah perdagangan lintas batas *sub-region* yang masih dalam tahap *development*, diharapkan dapat memberdayakan UMKM dan sektor swasta; bermitra dengan *e-marketplace* lokal; mempromosikan penggunaan TIK secara komprehensif untuk meningkatkan nilai dan volume perdagangan intra-IMT-GT; serta sebagai tools untuk mengatasi kendala dalam memfasilitasi perdagangan elektronik lintas batas.

**Pertemuan the 13th Working  
Group on Agriculture and  
Agrobased-Industry (WGAA)**



# KAJIAN Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian

## Kajian Manfaat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bagi Sektor Pertanian



Kajian Manfaat *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) bagi Sektor Pertanian disusun sebagai bahan telaah bagi pegawai di Kementerian Pertanian serta pemangku kepentingan yang bergerak di sektor pangan dan pertanian tentang tantangan dan peluang kerja sama dengan 10 Negara ASEAN dan 5 Negara Mitra ASEAN (Cina, Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru).

Perjanjian RCEP memiliki potensi manfaat yang sangat besar untuk mendukung program “Gratiexs” yang diluncurkan oleh Menteri Pertanian RI, khususnya bagi pelaku usaha baik ekspor komoditas pangan dan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Berdasarkan kajian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama RCEP khususnya bagi Indonesia antara lain:

1. Upaya peningkatan ekspor jangka menengah yang dapat dicapai dengan mempercepat penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait 3 isu penting (isu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi).
2. Mempertahankan dan meningkatkan akses ke pasar tradisional seraya membuka akses ke pasar-pasar non tradisional.
3. Mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke produk dan jasa bernilai tambah.
4. Memanfaatkan secara penuh skema preferensi yang ada selama ini berupa beberapa perjanjian antara lain AEC, ASEAN+1s, IJEPA, INA-PAK FTA, dan lainnya.
5. Menargetkan pasar secara spesifik, fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan.
6. Menyusun “*negative list*” negara-negara tujuan ekspor.

## Kajian Desain, Regulasi Dan Potensi Kerjasama Perdagangan RI Dengan Negara Mitra Di Kawasan Afrika Dan Timur Tengah



Kajian bertujuan untuk memetakan desain hubungan perdagangan Indonesia dengan kawasan Afrika dan Timur Tengah disertai potensi perdagangan.

Poin-poin penting hasil kajian:

1. Menetapkan 10 negara di wilayah Afrika dan Timur Tengah sebagai fokus utama ekspor Indonesia: Maroko, Mauritius, Arab Saudi, Tunisia, Uni Emirat Arab, Mozambique, Qatar, Iran, Afrika Selatan, dan Nigeria.
2. Menentukan 50 jenis produk pertanian Indonesia sebagai fokus utama ekspor ke 10 negara tujuan tersebut, diantaranya minyak nabati, cokelat, margarin, kopi, buah-buahan, hewan ternak, dan ikan tuna olahan. Produk-produk tersebut dinilai memiliki efek kompetitif paling tinggi.
3. Dari hasil simulasi kegiatan perdagangan ekspor dengan 10 negara tersebut, diperoleh angka potensi penambahan nilai devisa lebih dari USD 360 juta (*trade Creation* USD 300 juta dan *trade diversion* lebih dari USD 69 juta). Kontribusi utama penambahan *Trade Effect* berasal dari perdagangan dengan Uni Emirat Arab, Tunisia, South Africa, Nigeria, dan Saudi Arabia, dengan kontribusi masing-masing mencapai lebih dari USD 30 juta.
4. Berdasarkan simulasi dan analisa lebih lanjut, termasuk pertimbangan hambatan tarif bagi ekspor Indonesia, 3 negara yang dapat menjadi tujuan prioritas ekspor produk pertanian Indonesia yakni Maroko, Tunisia, dan Mozambique, karena memenuhi kriteria sebagai negara *hub* dan negara yang telah menjalin komunikasi liberalisasi perdagangan dengan Indonesia.

## Kajian Optimalisasi Dukungan Ormas Asing Bidang Pertanian



Kajian merupakan kerja sama antara Biro KLN Kementan dengan CSIS yang ditujukan untuk: (1) mengidentifikasi ormas asing yang memiliki program pertanian di Indonesia; dan (2) mengkaji manfaat dan dampak keberadaan ormas asing di Indonesia dalam mendukung program pemerintah khususnya bidang pertanian.

Kajian dilakukan melalui: (1) identifikasi kesesuaian visi dan misi program; (2) tinjauan regulasi dan peraturan yang berlaku; (3) skema pendanaan; (4) monitoring dan evaluasi program.

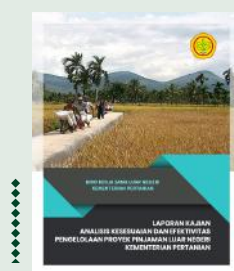
Berdasarkan hasil kajian, beberapa hal yang perlu ditekankan terkait tata kelola ormas asing di Indonesia diantaranya:

Filosofi ormas: (1) Asas manfaat: Mendukung program pemerintah dan *transfer knowledge*; (2) Aspek legalitas: Memiliki izin prinsip dan izin operasional sesuai peraturan; (3) Aspek keamanan: Non intervensi - non politik - non intelijen. Dasar keberadaan ormas asing di Indonesia: (1) Harus mendukung kebijakan luar negeri Indonesia

(2) Tidak disalahgunakan sebagai akses bagi kegiatan asing yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan negeri; (3) Terdapat jaminan kepastian hukum; (4) Tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis yang terkait.

- Ormas asing harus memiliki durasi waktu operasional untuk mendukung kemandirian dan memastikan terjadinya proses *transfer knowledge* yang efektif.
- Perlu dilakukan *exit strategy*: pengakhiran program di suatu wilayah yang kelompok masyarakatnya sudah menerima manfaat (berupa *transfer knowledge* atau bantuan), agar dukungan yang diberikan tidak menimbulkan ketergantungan, mengingat kemandirian masyarakat merupakan salah satu tujuan operasional ormas asing di daerah.

## Kajian Analisis Kesesuaian dan Efektivitas Pengelolaan Proyek yang didanai dari Pinjaman Luar Negeri



Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pinjaman luar negeri, Biro KLN melakukan kajian Analisis Kesesuaian dan Efektivitas Pengelolaan Proyek yang didanai dari PLN, yaitu

(1) Proyek *Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)*, yang dikelola oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan; (2) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*, yang dikelola oleh Sekretariat Badan PPSDM Pertanian; (3) Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)*, yang dikelola oleh Pusat Pelatihan Pertanian; (4) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)*, yang dikelola oleh Pusat Penyuluhan Pertanian; (5) *Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)*, yang dikelola oleh Pusat Pendidikan Pertanian; dan (6) *Proyek Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLANDs)*, yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi.

Keenam proyek PLN dikategorikan ke dalam status "at risk" berdasarkan PMK 33/PMK.08/2020.

Kajian dilaksanakan dengan menganalisis kesesuaian dengan Renstra/RPJMN 2024 sebagai relevansi pelaksanaan proyek, dan menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran proyek untuk mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman.

Secara umum kajian menunjukkan hasil efektivitas pengelolaan anggaran di keenam proyek di tingkat pusat dan daerah bervariasi (cukup, efektif dan kurang efektif). Untuk itu, direkomendasikan penyusunan rencana aksi percepatan penyesuaian perencanaan anggaran dengan para pihak terkait.

# Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertanian

## Sosialisasi Peluang dan Mekanisme Pendanaan Multilateral

Seminar diselenggarakan pada tanggal 5-6 Agustus 2020 secara *hybrid* di Bogor dan virtual. Seminar bertujuan untuk memberikan panduan komprehensif bagi unit teknis di Kementerian Pertanian serta K/L dan mitra pembangunan terkait peluang, sumber dan mekanisme pendanaan multilateral dalam mendukung pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Pendanaan luar negeri merupakan sumber alternatif yang sangat penting sebagai upaya mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan inovasi dan transfer teknologi dari negara-negara maju melalui proyek-proyek percontohan (*reference model*). Lembaga multilateral di bawah PBB yang menangani isu pertanian FAO dan IFAD, menyampaikan skema kerja sama yang dapat dilakukan misalnya FAO melalui *technical cooperation programme* (TCP); *unilateral trust fund*; GCP, MTF, OSRO; UN *Joint Programme*; dan *Multi Partner Trust Fund*. *National focal point* kerja sama Pemri dengan *Global Environment Facility* (GEF) dan *Green Climate Fund* (GCF), dua lembaga pendanaan internasional yang fokus pada isu lingkungan dan perubahan iklim, menyampaikan area prioritas, pengajuan proposal dan mekanisme nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian nasional.

## Workshop Komersialisasi Produk IG Pertanian T.A. 2020

*Workshop* diselenggarakan pada tanggal 12 -13 Agustus 2020 dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjangkau masukan serta strategi yang perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi kinerja, promosi, dan perlindungan terhadap produk pertanian yang sudah bersertifikat Indikasi Geografis serta sebagai sarana koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan IG di Indonesia.

Pon-poin penting hasil *workshop* diantaranya:

- Upaya dalam mengembangkan daya saing di pasar global: (a) Perluasan pasar ekspor; (b) Branding produk IG; (c) Pemanfaatan e-Commerce atau platform bisnis berbasis internet; dan (d) Mendaftarkan perlindungan IG di luar negeri untuk produk unggulan Indonesia.
- Langkah-langkah komersialisasi produk IG: (a) Penguatan manajemen kelembagaan IG/MPIG; (b) Penguatan pemahaman dan penegakan hukum IG; (c) Menjaga kualitas produk; (d) Menjamin kebenaran kualitas dan daerah asal produk melalui penggunaan label yang benar dan lengkap berisi nama, logo, dan kode keterunutan; (e) Mengurangi rantai pasar sampai sedekat mungkin ke konsumen; (f) Promosi produk IG melalui media massa, pameran dan festival; (g) Pengembangan web pemasaran online; dan (h) Pendaftaran IG Pertanian ke luar negeri.

## Seminar Dukungan Lembaga Internasional terhadap Pembangunan Pertanian Indonesia 2020-2024

Seminar dilakukan pada tanggal 15 September 2020 di Bogor sebagai upaya fasilitasi kerja sama antar-lembaga internasional dalam mendukung pembangunan pertanian, khususnya Renstra Kementan 2020 - 2024. Terkait kolaborasi antar-lembaga, pandangan dari lembaga internasional, yakni IRRI, FAO, IFAD, dan IsDB:

1. UPLAND dengan dukungan IFAD dan IsDB berpotensi dijadikan *template model* proyek kerja sama, utamanya jika mencakup komoditas strategis ekspor sehingga berpartisipasi *global value chains* (GVCs).
2. Penggabungan kapasitas dan ahli dipercaya sebagai langkah baik untuk membangun proyek yang solid dan mendirikan langkah strategis yang dapat berkontribusi pada proyek kerja sama yang diinisiasi oleh IFAD bersama Pemri.
3. FAO bekerja bersama banyak pihak untuk menjangkau para petani, dalam mengimplementasikan secara spesifik suatu proyek.
4. IRRI menyadari bahwa kerja sama merupakan suatu hal yang penting dan menjadi keharusan. Ada kesempatan dan peluang dari IsDB untuk berkontribusi bersama mendukung Renstra Kementan, salah satunya untuk rice sebagai tanaman terpenting bagi Kementan.

**Workshop  
Mekanisme  
Penyusunan  
Kegiatan  
Kerja Sama  
di bawah  
Forum  
ASEAN**

*Workshop* diadakan pada tanggal 17 September 2020 di Bogor dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada unit teknis selaku *focal point* di bawah kerangka AMAF mengenai mekanisme penyusunan kegiatan/ pengajuan proposal di forum ASEAN. *Workshop* menggali secara rinci mulai penyusunan kegiatan yang mengacu pada *roadmap* Kementan yang disusun oleh masing-masing unit teknis dan *Strategic Plan of Action (SPA)* dari masing-masing *Working Group (WG)*, *Expert Working Groups (EWG)* dan *Sectoral Working Group*. Dalam *workshop*, peserta diminta untuk mengidentifikasi kegiatan yang sekiranya dapat diusulkan ke ASEC. Melalui *workshop* ini diharapkan tidak ada keraguan dari unit teknis di lingkup Kementan untuk segera menyusun proposal kegiatan sehingga dapat diajukan pada forum di bawah AMAF. Sebagai contoh, Indonesia dapat mengusulkan *Edu Agro Tourism* mengingat Indonesia memiliki banyak potensi daerah pertanian wisata edukasi, sekaligus menjadi percontohan bagi negara ASEAN lainnya. Selain itu, saat ini belum ada negara ASEAN yang mengusulkan proposal kegiatan bidang pertanian terkait Revolusi Industri 4.0 (4.0 IR). Hal ini sangat dapat diusulkan oleh Indonesia, mengingat pentingnya mekanisme sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas maupun efektivitas. Suatu proposal akan disetujui selama kegiatan yang diusulkan dapat memberikan manfaat bagi negara ASEAN lain, meskipun masih bersifat *pilot project*.

**FGD/ Workshop Fasilitas Ekspor Melalui Platform Website untuk Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan ([www.agroindotrade.com](http://www.agroindotrade.com))**

Biro KLN saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan pengembangan website berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari para *stakeholders* terkait yang berpartisipasi di dalam beberapa pertemuan FGD yang diselenggarakan oleh Biro KLN mulai dari bulan Juli sampai dengan September 2020. Pelaksana operasionalisasi *platform* merupakan para wirausahawan muda yang juga Duta Petani Milenial (DPM) telah memproses pendaftaran sekitar lebih dari 80 pelaku usaha. Buku panduan juga telah disusun untuk kemudahan pengguna *website*. Upaya keamanan *website* pun telah diaplikasikan dalam rangka menjamin keamanan bertransaksi secara daring.

Fasilitasi pembinaan para petani yang menjadi mitra rencananya akan dilakukan melalui berbagai program seperti mengikutsertakan dalam program pemerintah (misal: pembinaan dari Kemtan dan Kemdag dan K/L terkait). Pengenalan dan promosi secara daring mengenai [agroindotrade.com](http://agroindotrade.com) telah beberapa kali dilakukan dengan sasaran *stakeholders* di pemerintahan, Kadin, perwakilan negara sahabat di Indonesia serta di negara-negara ditematkannya Atase Pertanian Indonesia yakni Amerika Serikat, Italia, Jepang dan Belgia. Penjajakan kerja sama maupun promosi juga sedang diupayakan melalui pertemuan daring, diantaranya dengan Diaspora Amerika Serikat. Berdasarkan kegiatan promosi yang dilakukan di Chicago, Indiana, New York dan San Fransisco diperoleh informasi bahwa Diaspora AS sangat berminat untuk menjadi mitra kerja sama maupun sebagai *local agent*, misalnya kerja sama pergudangan di luar negeri.

Serial FGD digelar selama bulan September 2020 dengan tujuan untuk menghimpun informasi terkait potensi ekspor komoditas pertanian dari kawasan perbatasan, kendala yang dihadapi, dan kemungkinan potensi investasi pertanian di daerah tersebut. Komoditas unggulan intra BIMP EAGA yang diidentifikasi mencakup kambing, lada, dan beras di Kalimantan Barat; pisang, minyak kelapa sawit dan durian di Kalimantan Utara; kelapa dan kopra, kakao di Sulawesi Utara; jagung, kelapa, dan kakao di Gorontalo; serta kelapa, ubi jalar dan salak di Maluku Utara. Sementara itu, FGD IMT-GT menghasilkan kesepakatan antar negara anggota IMT serta langkah strategis kerja sama perdagangan produk pertanian yaitu (1) pengembangan pasar digital antar negara di IMT-GT melalui platform *e-Commerce* yang akan diluncurkan pada 2021; (2) peningkatan kapasitas bagi UKM dalam meningkatkan *skill* di era industri digital 4.0; (3) konektivitas antar negara IMT-GT; (4) penggalian potensi pertanian secara luas mencakup komoditas perkebunan, peternakan dan hortikultura; (5) investasi lintas batas dalam pengembangan produk karet dan buah-buahan sebagai sesama negara produsen; (6) pengembangan dan pemanfaatan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses perdagangan lintas batas, melalui pemanfaatan teknologi pertanian presisi.

**FGD  
Pengembangan  
Ekspor  
Komoditas  
Pertanian  
dalam  
Kerangka Kerja  
Sama IMT-GT  
dan BIMP-EAGA**

Kegiatan Orientasi diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2020. Orientasi kebijakan pertanian bagi diplomat RI merupakan kegiatan rutin tahunan yang merupakan kerja sama antara Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian dan Biro SDM Kementerian Luar Negeri.

Tema orientasi tahun ini terkait kebijakan pertanian secara umum yang terdiri dari peraturan yang terkait dengan ekspor dan impor produk pertanian serta peraturan perkarantinaan. Para diplomat akan diberangkatkan ke wilayah penugasan mulai awal Agustus 2020. Mempertimbangkan perlunya penerapan protokol kesehatan akibat dampak Covid-19 aktivitas kunjungan lapangan ditiadakan dan kegiatan dilaksanakan melalui metode daring.

## Orientasi Kebijakan Pertanian Bagi Diplomat RI

### Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian Data PHLN pada Aplikasi SIPOR PHLN Versi 3.0

Bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait tata cara penginputan data kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) telah diselenggarakan pada tanggal 13-14 Agustus di Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh para satker pengelola PHLN di Kementan.

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) Kementerian Pertanian versi 3.0 masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan menu input data bagi para Satker Pengelola PHLN lingkup Kementerian Pertanian dan output untuk instansi terkait (Bappenas dan Kemenkeu) sebagai bahan laporan setiap Triwulan. Aplikasi SIPOR PHLN ini telah mengembangkan beberapa menu dan tampilan sebagai berikut: (a) Pengembangan pada tampilan *dashboard* Informasi publik; (b) Pembangunan Menu AWP Pinjaman Luar Negeri; (c) Pengembangan menu (fitur) pada data *on granting*; (d) Pengembangan menu (fitur) pada data Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan (e) Desain logo aplikasi SIPOR PHLN dan penyempurnaan pada ekspor PDF dan Excel untuk Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Bimtek ditutup dengan pemberian sertifikat kepada masing-masing pengelola sebagai tanda telah menyelesaikan input data dan telah memahami tata cara penginputan data aplikasi SIPOR PHLN V.3.0.

Bimbingan teknis Web e-PDLN Kementerian Pertanian diselenggarakan pada tanggal 10-11 September 2020 di Bogor dan secara daring. Beberapa poin penting yang disampaikan terkait Kebijakan Pembatasan Pelayanan PDLN selama masa pandemi Covid-19 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara No. B-18/Kemensetneg/Ses/LN.00/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No 03702/PK/03/2020/64 tanggal 16 Maret 2020 ke seluruh K/L/I mengenai Pembatasan Sementara Layanan Penerbitan Dokumen PDLN.

Kegiatan Bimtek dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk Biro KLN untuk mengembangkan web <http://epdln.pertanian.go.id>. kepada para peserta (LO) selaku operator E-PDLN lingkup Kemenan. Peserta melakukan simulasi pengisian data di web E-PDLN berdasarkan dokumen PDLN yang ada, dilanjutkan dengan diskusi terkait kesulitan dan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan web E-PDLN ini. Selanjutnya, Biro KLN akan melakukan penyempurnaan web E-PDLN dan diharapkan penggunaannya dapat mulai dilakukan pada tahun 2021.

## BIMTEK website e-PDLN

# Koordinasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Biro KLN Triwulan III TA 2020



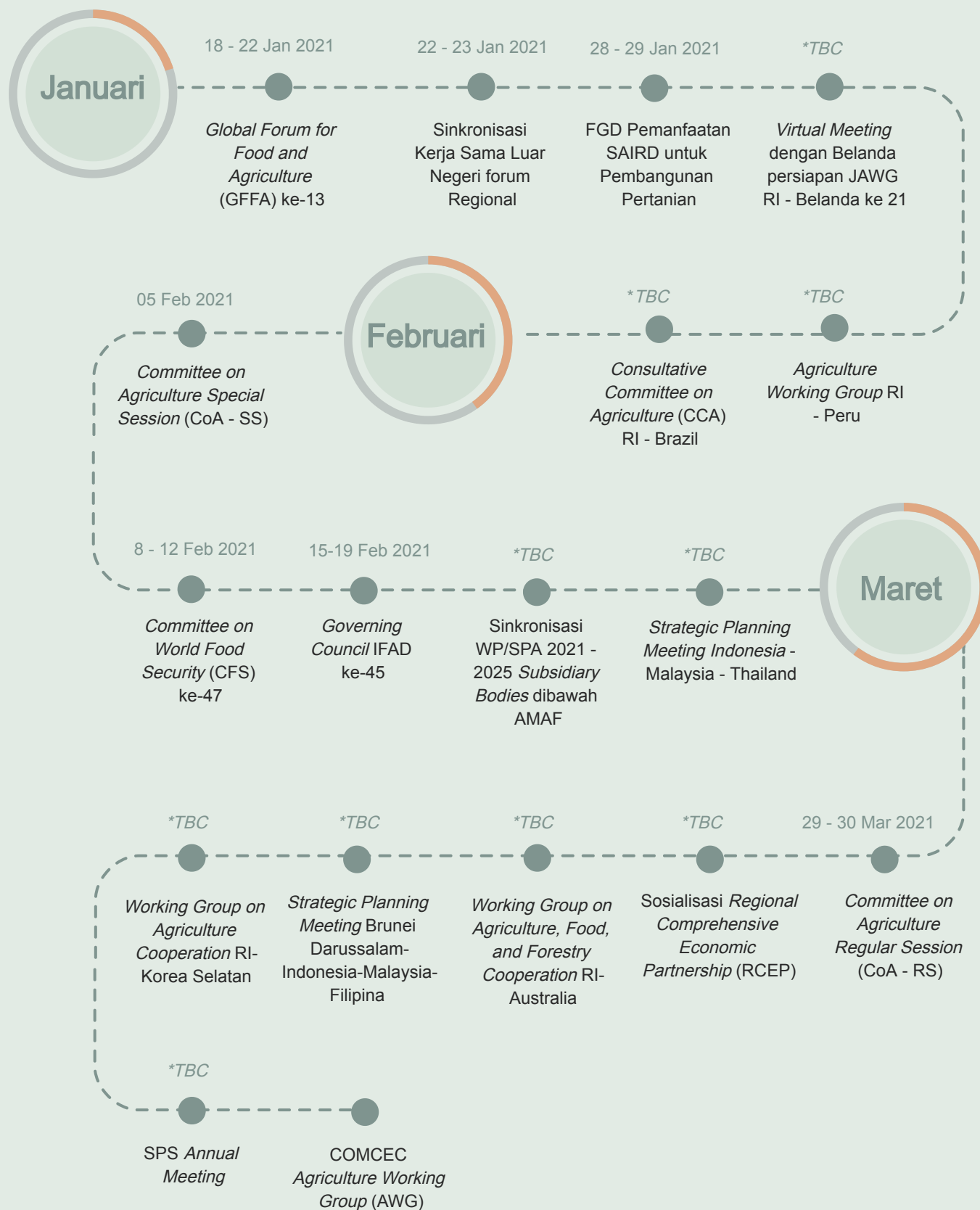
Sekjen Kementan menyampaikan arahan dalam SPI Biro KLN

Kegiatan Koordinasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian diselenggarakan pada tanggal 7 - 8 Agustus di Bogor. Acara SPI dibuka oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Momon Rusmono, MS) dan turut dihadiri secara virtual oleh empat Atase Pertanian. Sekjen Kementan menyampaikan semangat agar ASN dapat bekerja lebih keras untuk mencapai target pembangunan pertanian dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, termasuk dengan bersama-sama menciptakan *the Winning Team*. Beberapa poin yang harus diperhatikan untuk mewujudkan *the Winning Team*, yaitu Integritas; Komunikasi dan koordinasi; Fokus (*be excellent*); Memiliki keinginan/mimpi. Selanjutnya narasumber dari Lembaga Psikologi Universitas Indonesia menyampaikan konsep *Ikigai*, yaitu keseimbangan dalam empat faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi seseorang, yaitu passion, keahlian, permintaan dan nilai. *Ikigai* dapat diterapkan untuk mewujudkan gagasan kebahagiaan dalam hidup, termasuk kebahagiaan dalam bekerja.



Psikolog UI memberikan motivasi dan spirit bagi staf Biro KLN

# AGENDA KERJA SAMA LUAR NEGERI JANUARI - MARET 2021







Tim Redaksi Buletin

*Diplomasi*

Biro Kerja Sama Luar Negeri  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung A Lt. 6  
Ragunan, Jaksel 12550  
email: publikasi.kln@gmail.com  
www.pertanian.go.id